

TESIS NU_ROKHIB 20550010

turnitin

by Admin Turnitin

Submission date: 21-Aug-2022 04:14AM (UTC-0400)

Submission ID: 1884896886

File name: TESIS_NU_ROKHIB_20550010_turnitin.pdf (1.1M)

Word count: 31557

Character count: 208707

**KARAKTERISTIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TUBAN
ERA PANDEMI COVID-19**

17
TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik**



Oleh

MOH. NUROKHIB

NIM: 20550010

1
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2022

**KARAKTERISTIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TUBAN
ERA PANDEMI COVID-19**

17
TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik**



Oleh

MOH. NUROKHIB

NIM: 20550010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis:

**KARAKTERISTIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TUBAN ERA PANDEMI COVID-19**

Oleh

MOH. NUROKHIB

NPM. 20550010

Tesis ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk di ujikan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
KARAKTERISTIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TUBAN
ERA PANDEMI COVID-19

Oleh

MOH. NUROKHIB
NPM. 20550010

Telah dipertahankan di depan penguji dan telah memenuhi syarat
pada tanggal 12 juli 2022

Komite Dewan Penguji,
Ketua Dewan Penguji

(Dr. Darsono, Drs., M.Si.)

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si. :

Anggota

Dr. Frederik Fernandes, Drs., M.Pd. :

Anggota

Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si. :

Anggota

Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si. :

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

(Drs. Suahyo Tri Budiono, M.Si.)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Nurokhib

NPM : 20550010

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Tesis : Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Surabaya, 12 Juli 2022

Materai 10000

Moh. Nurokhib
NPM: 20550010

MOTTO

“DZIKIR, FIKIR DAN AMAL SHOLEH”

“JADILAH ORANG YANG BERMANFAAT, KARNA ¹⁵⁵SEBAIK BAIKNYA”

“ORANG ADALAH YANG BERMANFAAT UNTUK YANG LAIN”

RIWAYAT HIDUP

Moh. Nurokhib, lahir di Tuban pada tanggal 12 April 1989. Tinggal di Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Menempuh pendidikan Strata 1 (S1) program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhдум Ibrahim (STITMA) Tuban.

Saya merupakan anak ke-tiga dari pasangan H. Sholeh dan Warsi, dan istri dari Nurul Febriyanti. Dari pernikahanku dengan Nurul Febriyanti, kami dikaruniai 1 anak yaitu: Albi Dipta Kautsar.

Pengalaman organisasi antara lain sebagai Ketua Karang Taruna Desa temaji 2017-2019, 2019-2020, Ketua kelompok tani "SIDODADI" desa Temaji 2014-2019, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Gunawan Fajar Tuban 2017-2019. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Jenu 2017-2019, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban Tahun 2019-2024.

Nomor Telp : 0852 3048 0254 / 0813 6387 3960

Email : muhamadrokhib17@gmail.com

Surabaya, 12 Juli, 2022

Moh. Nurokhib

NPM. 20550010

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua Saya yang menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan anaknya untuk terus sukses dalam menjalani kehidupan.
2. Istri Tercinta: Nurul Febriyanti yang selalu mensupport saya dalam setiap langkah perjuangan.
3. Anak saya: Albi Dipta Kautsar yang menjadi penyemangat hidup kami untuk terus mencapai cita-cita.
4. Saudara-saudara saya yang sudah memberikan semangat untuk penyelesaian studi ini.
5. Teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan semangat dalam mencapai gelar Magister Ilmu Politik
6. Bapak/Ibu dosen Magister Ilmu Politik, secara khusus kepada pembimbing tesis ini yaitu Bapak Darsono dan Bapak Mangihut Siregar yang sudah bersedia membimbing dan mengajari saya menjadi insan yang berpendidikan.
7. Almamater tercinta Universitas Wijaya Kusuma yang menjadi tempat menuntut ilmu.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

ABSTRAK

Moh Nurokhib. 2022. “Karakteristik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19” Tesis Program studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pembimbing Utama: Dr. Darsono, Drs., M.Si Pembimbing Pendamping: Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Kata Kunci: Karakteristik Pemilih, Pilkada, Covid-19

Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Didalam pilkada kita mengenal karakteristik pemilih pemula yang membedakan dengan pemilih lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pemilih pemula pada pilkada serentak 2020 era pandemi covid-19 di kabupaten Tuban, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi karakteristik pemilih pemula pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode analisa deskriptif model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukkan (1) karakteristik Pemilih pemula Pada pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tuban, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pemilih pemula pada pilkada serentak 2020 di kabupaten Tuban, Serta adanya pandemi Covid-19 ini apakah berimplikasi pada pelaksanaan tahapan pilkada Kabupaten Tuban. Dengan penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam, data di analisis secara deskriptif kualitatif temuan penelitian ini adalah: (1) karakteristik pemilih pemula yang rasional (2) kritis (3) tradisional (4) skeptis dan (5) karakter yang transaksional. Faktor yang mempengaruhi karakteristik adalah: (1) faktor sosial dan budaya (2) faktor ekonomi dan pendidikan (3) faktor media (4) faktor figur pasangan calon (5) faktor money politik.

65
KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19” Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat menempuh studi Strata 2 (S2) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya guna meraih gelar Magister Ilmu Politik.

44
 terselesaikannya tesis ini, adalah atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang bahagia ini, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam - dalamnya yang sudah membantu dan khususnya kepada pembimbing bapak Dr. Darsono, M.Si. dan bapak Dr. Mangihut Siregar M.Si. Semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

1
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. TRHT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Politik, terimakasih atas pengetahuan dan ilmu yang selama ini sudah disampaikan kepada kami
4. Kepada kedua orang tua tercinta, terimakasih atas do'a dan dukungan yang terus mengalir sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas kuliah ini dengan baik.
5. Teruntuk istri dan anak tercinta Nurul Febrianti dan Albi Dipta Kautsar yang dengan tulus memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas kuliah ini dengan baik.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta motivasi semangat dan terus melangkah untuk menyelesaikan tugas ini.
7. Sahabat-sahabati di MIP FISIP UWKS, terimakasih atas persahabatan kita selama ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam materi tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga hasil karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 12 juli 2022

Moh. Nurokhib
 NIM. 20550010

1 DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Definisi Istilah	18
BAB II KERANGKA TEORI	20
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	20
2.2 Kajian Teori	42
2.2.1 Teori Demokrasi	42
2.2.2 Demokrasi di Indonesia	49
2.2.3 Sistem Demokrasi di Indonesia	50
2.2.4 Teori Partai Politik	60
2.2.5 Perilaku Pemilih	64
2.2.5.1 Pemilih Pemula	76
2.2.5.2 Persepsi Pemilih Pemula	82
2.3 Kerangka Berpikir	84
BAB III METODE PENELITIAN	85
3.1 Jenis Penelitian	85
3.2 Obyek Penelitian	86
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	87
3.4 Teknik Pengumpulan Data	88

3.5	85	Teknik Analisis Data	90
BAB IV DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN			93
4.1		Geografis Tempat Penelitian	93
4.2		Demografi Kabupaten Tuban	95
4.3		Pemilih di Kabupaten Tuban	98
4.4		Jumlah Perolehan Pasangan Calon	100
4.5		Kondisi Sosial dan Budaya di Kabupaten Tuban	102
4.6		Peta Politik Kabupaten Tuban	103
BAB V TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN			106
5.1	5	Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pilkada Era Pandemi	106
5.2		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pilkada Era Pandemi	122
BAB VI DISKUSI DAN IMPLIKASI POLITIK			135
6.1		Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19	135
6.2		Implikasi Teoritik	139
BAB VII PENUTUP			142
7.1		Kesimpulan	142
7.2		Saran	144
DAFTAR PUSTAKA			146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 ⁵¹	10
Tabel 1.2 Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 ¹⁴⁰	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan ¹	26
Tabel 2.2 Penggunaan Pendekatan Rasional, Emosional dan Tradisional	40
Tabel 2.3 Demokrasi di Indonesia	58
Tabel 2.4 Indikator Pemilih Rasional	70
Tabel 2.5 Indikator Pemilih Kritis	71
Tabel 2.6 Indikator Pemilih Tradisional	72
Tabel 2.7 Indikator Pemilih Skeptis	73
Tabel 2.8 Indikator Pemilih Transaksional	75
Tabel 2.2.5.1 Indikator Pemilih Pemula	79
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Tuban	95
Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2020	96
Tabel 4.2.2 Penduduk Kabupaten Tuban Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 ¹³	97
Tabel 4.3.1 Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 ⁷²	98
Tabel 4.4.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020	100
Tabel 4.6.1 Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Tuban periode 2019-2024 ¹¹⁶	104

69
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	8
Gambar 2.1	41
Gambar 4.1	94

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalannya demokratisasi di Indonesia dipisahkan oleh pengenalan kerangka multi-partai. Kerangka kerja multi-partai adalah kerangka kerja pesta yang menampung banyak kumpul-kumpul. Selama waktu yang dihabiskan untuk demokratisasi, individu dipandang sebagai pemegang kekuasaan terbesar, Hal itu terlihat dengan diwujudkan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung individu yang akan duduk untuk memimpin otoritas publik sesuai periode yang bersangkutan..

Keputusan yang diambil secara langsung dengan memilih pesaing baik dari pelamar regulatif maupun pelamar utama memberikan kesempatan kepada individu untuk memilih pesaing mereka. Kehidupan negara yang mayoritas berkuasa selalu didasarkan pada aturan bahwa individu berdaulat sehingga mereka memiliki hak istimewa untuk terlibat dengan latihan politik. Hal ini juga mempengaruhi cara yang paling umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang paling umum dilakukan secara lugas, mirip dengan cara pemilihan Presiden yang paling umum dilakukan pada keputusan politik umum tahun 2004, sehingga derajat kontribusi daerah dalam siklus politik negara adalah lebih selesai. Terlebih lagi, pengangkatan langsung kepala daerah dan kepala provinsi yang diangkat juga merupakan kesempatan untuk memahami pemerintah

wilayah yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 02 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang, adalah dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan preseden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan dewan perwakilan daerah) dan pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota) di negara Republik Indonesia.

Pilkada di Indonesia Pada tahun 2020 akan dilaksanakan sementara untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2021. Kerangka kerja politik kepala wilayah merangkap pada tahun 2020 ini merupakan yang keempat kalinya diadakan di Indonesia. Pada Desember 2020, total daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2020 adalah 9 wilayah, 224 kabupaten dan 37 kota di seluruh Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung sebagai bentuk perubahan demokrasi pasca reformasi, memberikan kebebasan kepada rakyat di daerah untuk memilih pemimpinnya secara langsung sesuai dengan pilihan hati nurani. Pilkada ini mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam setiap penyelenggaraan

Pilkada, termasuk Pilkada era pandemi, identifikasi pemilih oleh tim pemenangan pasangan calon kepala daerah menjadi krusial untuk memetakan komposisi pemilih dan sekaligus memenangkan pasangan calon. Selain pemilih yang masih belum memiliki kepastian untuk menggunakan hak pilih, pemilih pemula menjadi sasaran yang cukup penting dalam kampanye pasangan calon kepala daerah, Karena jenis pemilih inilah yang belum memiliki pilihan tetap yang kokoh. Sebagai orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019, pemilih pemula adalah masyarakat yang berusia tujuh belas tahun atau lebih pada saat pemungutan suara tiba atau telah/telah kawin.

Disebutkan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2019 pasal 5 ayat (1), Untuk dapat menjalankan haknya memberikan suara dalam suatu keputusan politik, seorang penduduk Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali jika ditentukan secara umum dalam undang-undang, dan warga negara sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih di hari pemungutan suara atau sudah/telah kawin,
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk Elektronik,
- d. Jika Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf C, dapat menggunakan surat

keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,

e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejarah pemilihan kepala daerah serentak pertama kali diselenggarakan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2015, dengan jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak sebanyak 204 daerah, terdiri dari 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. Pemilihan kepala daerah serentak ke-2 diselenggarakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 dengan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak sebanyak 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Pemilihan kepala daerah serentak ke-3 diselenggarakan pada tanggal 27 Juni tahun 2018 dengan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemilihan kepala daerah serentak ke-4 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, dengan jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak sebanyak 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Selanjutnya pemilihan kepala daerah serentak hasil pemilihan tahun 2020 akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan November tahun 2024, sesuai dengan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur yang berada di bagian barat dengan luas wilayah 183.994'561 Ha. Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 328 kelurahan/desa. Adapun jumlah pemilih kabupaten Tuban pada pemilihan kepala daerah Tahun

2020 sebanyak laki-laki 465.537 dan perempuan 476.982 jumlah total 942.519 pemilih. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dimasa covid-19, kontestasi pemilihan kepala daerah di kabupaten Tuban pada tahun 2020 di ikuti sebanyak tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketiga pasangan calon tersebut adalah pendatang baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten Tuban. Pasangan calon nomor urut satu adalah pasangan Kozanah Hidayati S.P., M.P. dan Muhamad Anwar, latarbelakang Kozanah Hidayati S.P., M.P. adalah seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) jawa timur periode 2014-2019 - 2019-2020 yang sebelumnya juga anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten Tuban Periode 2009-2014. Wakilnya adalah Muhamad Anwar latarbelakang seorang Politisi sekaligus pengusaha terkenal yang ada di kabupaten Tuban, pasangan ini di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan calon nomor urut dua adalah Aditya Halindra Faridzky S.E. dan H. Riyadi, S.H, latarbelakang Aditya Halindra Faridzky S.E. adalah seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) jawa timur periode 2019-2020 dari partai golongan karya (GOLKAR) yang juga sebagai ketua dewan pimpinan daerah (DPD) partai GOLKAR kabupaten Tuban 2020-2025. Wakilnya adalah H. Riyadi, S.H. latarbelakang seorang mantan kepala desa Maibit kecamatan Rengel periode 2007-2013, juga seorang pengusaha bahan pangan di kabupaten Tuban, pasangan ini di usung oleh partai golongan karya (GOLKAR), partai demokrat (PD) dan partai keadilan sejahtera (PKS). Pasangan calon nomor urut tiga adalah H. Setiadjit S.H., M.M. dan DR. RM. Armaya Mangku Negara, S.H., M.H latarbelakang H.

Setiadjit S.H., M.M. adalah seorang birokrat yang pernah menjabat sebagai Plt. bupati Jombang tahun 2018, menjabat kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur 2017-2018 dan yang terakhir menjabat sebagai kepala dinas energi sumber daya mineral (ESDM) provinsi jawa timur tahun 2018-2020. Wakilnya adalah DR. RM. Armaya Mangku Negara, S.H., M.H. latarbelakang seorang praktisi hukum dan menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren walisongo Gomang Singgahan Tuban, serta dosen di universitas sunan bonang Tuban mulai Tahun 2015, pasangan ini di usung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP), partai gerakan indonesia raya (GERINDRA), partai amanat nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai bulan bintang (PBB). Untuk menarik simpati masyarakat, berbagai metode kampanye dilakukan oleh ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban mulai dari rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, kampanye melalui medsos dan kampanye model daring. Semua dilakukan semata-mata untuk menarik simpati masyarakat dan mendapatkan dukungan suara termasuk suara dari pemilih pemula, karna seringkali keikutsertaan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dilandasi dengan beberapa pertimbangan, misalnya kedekatan sosial, hubungan kerabat dengan para calon bupati dan wakil bupati, pemahaman politik lokal pada masyarakat, ataupun karena kesadaran politik yang sudah baik sehingga muncul rasionalitas-rasionalitas dalam menentukan pilihan.

Setelah terlaksananya penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020 maka, sesuai dengan hasil perolehan suara dalam rapat pleno

penetapan hasil perolehan suara komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, sebanyak 721.089 pemilih¹⁴ memberikan hak pilihnya dari 942.519 pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Suara sah 705.189 dan suara tidak sah 15.900 atau ada 76,38% yang memilih dan 221.430² pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sebanyak 23,42% . Tingkat partisipasi pemilih dalam¹ pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020 era pandemi covid-19 mengalami peningkatan, di Jawa Timur peningkatan partisipasi pemilihnya tertinggi bila dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban sebelumnya di tahun 2015.⁹

Berdasarkan data rata-rata¹⁶⁶ perbandingan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun pemilihan 2015 dan Pilkada tahun 2020 yang bersumber dari data komisi pemilihan umum²⁰ provinsi Jawa Timur, terdapat 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 se Jawa Timur, kenaikan partisipasi pemilih di setiap kabupaten sangat beragam bahkan ada juga yang angka partisipasinya turun, untuk daerah yang kenaikan partisipasinya tertinggi adalah Kabupaten Tuban dengan kenaikan partisipasi pemilih sebanyak 24,47% , sedangkan angka partisipasi yang turun adalah Kota Pasuruan, dengan angka penurunan partisipasi -3,66%.²² Pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2015 angka partisipasi pemilih sebanyak 51,91%, sedangkan pemilihan serentak tahun 2020 angka partisipasi pemilih di Kabupaten Tuban sebanyak 76,38%.

Gambar 1.1
Perbandingan Rata-Rata Partisipasi Pemilih di Jawa Timur



Sumber: KPU Provinsi Jawa Timur

9
 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi perhelatan pesta rakyat dalam demokrasi yang menarik dan “mendebarakan” serta menyedot perhatian. Pertarungan politik bukan hanya terjadi antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya, tetapi justru lebih keras terjadi pada tim pemenang pasangan calon yang sampai berimbas ke akar rumput (Asfar, 2006).

16
 Dalam setiap proses tahapan pemilihan kepala daerah (PILKADA) selalu mengundang perhatian publik. Identifikasi pemilih oleh tim pemenang menjadi krusial untuk memetakan komposisi pemilih dan sekaligus memenangkan pasangan calon. Selain pemilih yang masih mengambang, pemilih pemula menjadi sasaran penting dalam kampanye pasangan calon karena jenis pemilih inilah yang belum

memiliki pilihan tetap yang kokoh. Sebagai orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019, pemilih pemula adalah masyarakat yang genap berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan akan menggunakan hak pilihnya yang pertama.

Tingginya angka partisipasi Pemilih yang ada di Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 era pandemi covid-19 tidak terlepas dari keterlibatan pemilih pemula dalam menyumbang angka partisipasi pemilih, keputusan yang di ambil untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, pengaruh itu bisa datang dari berbagai aspek baik sosiologis, psikologis atau rasional, oleh karna itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang karakteristik pemilih pemula di kabupaten Tuban, karena pemilih pemula selain sebagai pengguna hak pilih sat ini tapi nantinya pemilih pemula ini akan menjadi pelopor pemilih dimasa mendatang yang akan menjadikan kualitas demokrasi semakin baik, pada umumnya pemilih pemula belum memiliki jangkauan pengetahuan politik yang luas untuk memutuskan pilihan kepada calon bupati dan wakil bupati mana yang harus mereka pilih, Pada situasi seperti ini pemilih pemula selalu menjadi bidikan dan sasaran setiap tim sukses pasangan calon atau kandidat untuk meraih dukungannya. Selain itu seperti yang kita ketahui dari data KPU Provinsi Jawa Timur bahwa kenaikan partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 saat pandemi covid-19 berada di Kabupaten Tuban, dengan angka kenaikan partisipasi pemilih sebanyak 24,47%. Pemilih pemula disini sebagai salah satu objek dalam

kegiatan-kegiatan politik, mereka masih memerlukan pembinaan-pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan, agar dapat berperan dalam bidang politik.

⁸⁶ Dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ⁵ komisi pemilihan umum daerah (KPU) kabupaten Tuban pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2015 di tetapkan sebanyak 936.768 pemilih. Sedangkan pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020 saat pandemi covid-19, daftar ²⁰ pemilih tetap (DPT) meningkat menjadi 942.519 pemilih, artinya ada pemilih baru sebanyak 5.751 pemilih dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Tabel 1.1

⁹ **DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban**

Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		Lk-Pr
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kenduruan	9	11192	11293	22485
2	Jatirogo	18	22250	22582	44832
3	Bangilan	14	18918	19107	38025
4	Bancar	24	22354	22904	45258
5	Senori	12	16596	16992	33588
6	Tambakboyo	18	16092	16184	32276
7	Singgahan	12	16234	16586	32820
8	Kerek	17	26458	27720	54178
9	Parengan	18	21419	22149	43568
10	Montong	13	21897	21300	43197
11	Soko	23	33440	34099	67539
12	Jenu	17	20272	20662	40934
13	Merakurak	19	22321	23212	45533
14	Rengel	16	23555	24125	47680

15	Semanding	17	40552	42651	83203
16	Tuban	17	30787	33322	64109
17	Plumpang	18	30810	31248	62058
18	Palang	19	31895	32899	64794
19	Widang	16	19512	20035	39547
20	Grabagan	11	15585	15559	31144
JUMLAH		328	462139	474629	936768

Sumber: KPU Kabupaten Tuban

Keberadaan pemilih baru atau pemilih pemula tersebut menjadi target bagi banyak partai politik pendukung atau pasangan calon bupati untuk mendapatkan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Tuban. Para pemilih pemula ini umumnya belum terinformasikan tahapan tahapan pemilihan serta kurang memiliki pendidikan politik yang memadai. Dengan asumsi ini, partai politik pendukung atau pasangan calon berupaya mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui segala upaya, ada beberapa alasan mengapa para pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan, karna sebagian besar pemilih pemula masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pemilih pemula berpartisipasi dalam sebuah pemilihan kepala daerah bisa saja karena diiming-imingi sesuatu, misalnya adalah uang atau barang ketika mau menggunakan hak pilihnya dan mau memilih salah satu pasangan calon, bahkan ada pemilih pemula yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana karakteristik pemilih pemula dalam memutuskan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 dan faktor-faktor Pendorong serta Penghambat apa yang mempengaruhi karakteristik pemilih pemula dalam keputusan memilih calon bupati dan wakil bupati Tuban.

Tabel 1.1
DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		Lk-Pr
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kenduruan	9	11379	11490	22869
2	Jatirogo	18	22140	22446	44586
3	Bangilan	14	18758	19078	37836
4	Bancar	24	22757	23295	46052
5	Senori	12	16761	16645	33406
6	Tambakboyo	18	16374	16476	32850
7	Singgahan	12	16168	16403	32571
8	Kerek	17	26783	28039	54822
9	Parengan	18	21431	22052	43483
10	Montong	13	21714	21473	43187
11	Soko	23	33227	33668	66895
12	Jenu	17	21061	21494	42555
13	Merakurak	19	22677	23682	46359
14	Rengel	16	23238	23591	46829
15	Semanding	17	42109	44479	86588
16	Tuban	17	30926	32988	63914
17	Plumpang	18	30574	30992	61566
18	Palang	19	32315	33097	65412
19	Widang	16	19443	19751	39194
20	Grabagan	11	15702	15843	31545
JUMLAH		328	465537	476982	942519

Sumber: KPU Kabupaten Tuban

Perilaku pemilih pemula biasanya masih memiliki sifat-sifat yang goyah dan tidak bersemangat, informasi politik mereka pada umumnya akan kurang dalam hal, benar-benar mengikuti usia mereka dan mereka hanya belajar masalah legislatif, terutama dalam balapan atau keputusan. Pengetahuan pemilih pemula tentang politik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertemuan warga lainnya.

Cara berperilaku warga negara yang masih muda masih erat kaitannya dengan variabel humanistik, mental dan kewarasan dalam mengambil keputusan politiknya jika dilihat dari penyidikan pelaksanaan pemungutan suara (*casting a ballot conduct*). Kecenderungan (selera) yang digunakan sebagai alasan untuk mengambil keputusan seringkali kurang stabil atau mudah berubah sesuai data yang didapat atau kecenderungan yang meliputinya..

Pilkada serentak kabupaten Tuban 2020 dilaksanakan ¹⁶⁸ dalam kondisi pandemi covid-19, pelaksanaanya dengan menggunakan protokol kesehatan ketat, selain proses muncul berbagai peraturan untuk pembatasan dalam berkampanye, seperti kampanye langsung yang menghadirkan kerumunan banyak orang dilarang (Arifin, 2020). Padahal, kampanye jenis inilah yang selama ini paling massif digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dengan demikian, ada keterbatasan informasi yang bisa sampai ke masyarakat, terutama ke pemilih pemula. Padahal informasi inilah akan mempengaruhi preferensi politik bagi pemilih pemula, di samping informasi terkait pandemi covid-19 juga bisa menghatui mereka.

Sesuai berita dari kantor layanan kesejahteraan bahwa Coronavirus adalah ³⁰ golongan infeksi yang menyebabkan penyakit pada manusia dan makhluk. Dampak pada manusia umumnya menyebabkan penyakit saluran pernapasan, mulai dari penyakit berat hingga flu biasa, seperti Center East Respiratory Condition (MERS) dan Serious Intense Respiratory Disorder (SARS). Jenis Covid lain yang ³⁰ ditemukan pada manusia sejak kemunculannya di Wuhan, China, pada Desember 2019, selanjutnya diberi nama *Serious Intense Respiratory Disorder Covid 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus.

Kehadiran infeksi yang tak terhindarkan ini membuat otoritas publik bekerja keras untuk menangani dan mencegah penyebarannya, mulai dari penyusunan kembali rencana keuangan hingga melakukan inisiatif yang didukung wajib pajak dalam rangka penanganan virus corona. Demikian juga, pandemi virus corona juga membuat otoritas publik tetap bersinggungan dengan daerah setempat sehingga bersama-sama mencegah penyebaran infeksi. Sehubungan dengan daya pikat dari otoritas publik untuk mencegah penyebaran Coronavirus, sebagaimana dikutip di situs Kementerian Kesehatan (<https://www.kemkes.go.id/>).

Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan infeksi ini adalah:

- a. Menjaga tubuh agar tetap bugar dan prima serta menjaga kesehatan sistem imunitas/kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin;
- b. Bersihkan dengan benar dengan pembersih dan air atau gosok tangan berbahan dasar minuman keras. Mencuci dua tangan sepenuhnya selain memiliki kemampuan untuk membunuh infeksi pada tangan kita, kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat sederhana dan murah. Sekitar 98% penyebaran virus corona berasal dari tangan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kedua tangan sangatlah penting;
- c. Saat meretas atau mengi, tutup mulut dan hidung anda dengan tisu atau di dalam lengan atas Anda (bukan telapak tangan anda);
- d. Hindari berkerumun dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum;
- e. Usahakan untuk tidak menyentuh mulut, hidung dan mata (segitiga wajah). Tangan menyentuh benda-benda yang dapat tercemar infeksi.

Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut kita dengan tangan yang najis, infeksi pasti bisa masuk ke tubuh kita;

f. menutup mulut dan hidung dengan benar menggunakan masker ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum;

g. Buang tisu dan penutup yang terlibat di tempat sampah, lalu, kemudian bersihkan;

h. Menunda bepergian ke wilayah/negara tempat ditemukannya infeksi ini;

i. Hindari keluar rumah saat merasa tidak enak badan, terutama jika Anda demam, rewel, dan sulit bersantai. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan minta bantuan mereka, Beri tahu petugas jika dalam 14 hari terakhir Anda telah pergi ke negara yang terinfeksi, atau telah berhubungan dekat dengan orang yang memiliki efek samping serupa, Ikuti semua petunjuk dari kesehatan terdekat pekerja dan secara konsisten menyaring perkembangan Coronavirus dari sumber resmi dan akurat, mengikuti judul dan data dari pekerja kesehatan dan Kantor Kesehatan lingkungan. Data dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri dari penyebaran dan penularan Coronavirus.

Himbauan ini jelas merupakan pembantu otoritas publik untuk meyakinkan individu di seluruh Indonesia. Apalagi dengan koordinator balapan/keputusan yang melengkapi rencana aturan mayoritas lima tahun. Penyelenggaraan Pilkada Serentak (PILKADA) tahun 2020 tentu saja bermasalah dengan beberapa tanda daya pikat dari otoritas publik, misalnya menjauhi kontak dengan orang lain atau pergi ke tempat-tempat umum. Bagi koordinator ras/ras politik, hal ini tentu tidak

dapat diselesaikan secara ideal, koordinator ras politik/keputusan politik akan terus melakukan kontak nyata dengan beberapa perkumpulan yang berkepentingan dengan ras. Tidak terlepas juga dengan pemilihan bupati dan wakil bupati yang ada di kabupaten Tuban. Untuk mengetahui karakteristik pemilih pemula Ada beberapa metodologi yang harus dilihat, menurut Dennis Kavanagh dalam Mukti melalui bukunya yang berjudul “Political Theory and Political Way of Behaving” mengungkapkan: ada tiga macam untuk meruntuhkan perilaku warga negara, yaitu metodologi humanistik khusus, penelitian otak sosial, dan keputusan yang masuk akal. Ketiga metodologi tersebut sangat luar biasa dan telah menjelma menjadi cara berperilaku masyarakat umum dalam pengangkatan pejabat dan pejabat utusan Kabupaten Tuban pada tahun 2020 di masa pandemi virus corona, khususnya di kalangan pemilih amatir yang menjadi alasan memutuskan kegiatan politiknya, sehingga pendekatan ini dapat memahami penyebab dan atribut tajuik warga negara muda yang akan ditunjukkan melalui eksplorasi ini. Dari kenyataan eksperimental ini yang juga didukung oleh sudut pandang hipotetis, memperhatikan kecenderungan atribut warga negara yang masih muda dalam menetapkan keputusan mereka sangat menarik kepada seorang bupati dan wakil bupati tertentu, jumlah pemilih pemula di kabupaten Tuban yang jumlahnya mencapai ribuan orang, serta pemilih pemula ini yang nantinya akan menjadi salah satu tolok ukur demokrasi dimasa depan maka menarik dan urgen untuk dilakukan sebuah penelitian. Berdasarkan beberapa fakta diatas maka penulis merasa sangat tertarik untuk menganalisis fenomena politik yang ada di kabupaten Tuban melalui

penelitian berjudul “Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Tuban era pandemi covid-19?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi karakteristik pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Tuban era pandemi covid 19 dalam menentukan pilihan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memperoleh deskripsi ilmiah/saintifik tentang karakteristik pemilih pemula pada Pilkada serentak 2020 era pandemi covid-19 di kabupaten Tuban. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh deskripsi saintifik tentang karakteristik pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Tuban era pandemi covid-19 dalam menentukan pilihan
2. Memperoleh deskripsi saintifik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pemilih pemula pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Tuban era pandemi covid 19 dalam menentukan pilihan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam eksplorasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoretik-akademik

1. Sebagai bahan data logis bagi berbagai ilmuwan yang ingin melihat perilaku pemilih amatir dalam pilkada.
2. Meningkatkan teori politik berkonsentrasi pada dengan tujuan akhir untuk mendorong ilmu pengetahuan.
3. Memahami kekhasan sosial-politik saat ini di Tuban.

b. Manfaat Praktis

1. Mengetahui karakteristik pemilih pemula di Kabupaten Tuban, dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya berdasarkan umur, wilayah, pendidikan, dan pilihan politik serta Sebagai bahan untuk membantu para subjek politik, dan menyumbangkan pemikiran dalam memperkuat demokratisasi di berbagai bidang.
2. Mendapatkan penjelasan tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan pemilih pemula di Kabupaten Tuban dalam menentukan pilihan politiknya pada saat pemilihan kepala daerah serentak 2020, dan konsekuensi dari penelitian ini seharusnya digunakan sebagai semacam perspektif dalam ujian di tempat lain.

1.5 Definisi Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah karakteristik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban era pandemi Covid-19. Adapun definisi operasional konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik pemilih pemula adalah hal-hal yang lekat pada pemilih pemula yang membedakannya dengan pemilih yang lain.

- b. Pemilih pemula⁴² adalah masyarakat yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
- c. Pemilihan kepala daerah adalah praktik demokrasi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung.³
- d. Pandemi⁹⁸ adalah wabah yang merjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas.
- e. Covid-19³⁵ adalah suatu kelompok virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan mengakibatkan penyakit COVID-19.

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang bertema Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19". Pada dasarnya belum ada yang melakukannya atau menelitinya, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Prasetyawati dan Agus Satmoko Adi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Surabaya" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemilih pemula di Kota Surabaya mengharapkan kontestan dituntut kontribusi besar menghadapi masalah pandemi Covid- 19 selain pemerintah pusat. (2) karakteristik perilaku politik pemilih pemula pemilihan kepala daerah 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya menunjukkan sebagian besar pemilih pemula adalah pemilih kritis yaitu sebanyak 34%. Hanya 20% pemilih pemula di Kota Surabaya yang merupakan pemilih jenis skeptis. Sisanya 24% merupakan pemilih tradisional dan 22% merupakan pemilih yang rasional. (3) Dari hal tersebut pada pemilih pemula di Kota Surabaya dengan karakter pemilih kritis menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki faktor orientasi *policy problem solving* (kebijakan pemecahan masalah) dan faktor orientasi ideologi dalam memilih calon kontestan

pemilihan kepala daerah Kota Surabaya 2020. Dengan tingkat faktor orientasi *policy-problem solving* tinggi menimbulkan kepercayaan tinggi sehingga pemilih pemula akan mempunyai kesetiaan, loyal, dan tidak akan merubah pilihan dari calon kepala daerah Kota Surabaya yang dipilih jika calon kepala daerah Kota Surabaya yang dipilih sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arifin dengan judul penelitian “Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 (Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten Tuban)” dengan kesimpulan hasil penelitian Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tuban tahun 2020 merupakan pemilihan bersejarah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya di era pandemi Covid-19, Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 ini pada dasarnya tidak mengubah teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dan Teknis pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan, Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pilkada yang berjalan di tengah pandemic Covid-19 ini juga berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Mulai dari adanya optimalisasi anggaran yang harus difokuskan kepada pencegahan Covid-19, baik untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sampai dengan minimnya Rapat Koordinasi secara tatap muka, Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban juga mengalami kendala, hal ini dirasakan pada setiap tahapan yang di awasi. Mulai tahapan

pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rustan IR dan Munawir Ariffin dengan judul penelitian “Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019- 2024” hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perilaku pemilih Pemula di kecamatan Campalagian maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat empat model pendekatan perilaku pemilih pemula yang ditemukan di kecamatan Campalagian yaitu: (1) pendekatan psikologis, aspek dalam pendekatan psikologis yang mempengaruhi pemilih di kecamatan Campalagian ditemukan dalam bentuk identifikasi partai politik. Pemilih mengelompokkan diri dengan partai politik yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan mereka dan memilih calon yang ditawarkan oleh partai tersebut. (2) pendekatan retrospectif voting, aspek track record kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada juga menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Masyarakat Campalagian cenderung melakukan evaluasi terhadap kinerja calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada, jika mereka menilai calon tersebut berhasil pada jabatan sebelumnya atau pernah memberikan manfaat melalui kebijakannya maka mereka akan memilih calon tersebut. (3) pendekatan sosiologis, pendekatan ini mempengaruhi perilaku pemilih dalam aspek suku dan aspek ikatan kekeluargaan. Pada wilayah pedesaan di Campalagian

ditemukan pemilih primordial atau pemilih tradisional, yang menjatuhkan pilihan berdasarkan alasan-alasan primordial seperti suku dan ikatan kekeluargaan. (4) pendekatan pilihan rasional, aspek ini memperlihatkan suatu langkah maju dimana ada masyarakat Campalagian yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan pasangan calon. Kemampuan pemilih untuk menyeleksi secara rasional hasil dari sosialisasi dan komunikasi politik yang diterima untuk kemudian dijadikan sebagai dasar menentukan pilihan merupakan langkah menuju terciptanya pemilih-pemilih cerdas di Campalagian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh marno wance dan bakri la suhu dengan judul penelitian “partisipasi pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala daerah maluku utara” hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan ditemukan secara signifikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara, Hasil penelitian ini juga menggambarkan, Program-program yang di tawarkan oleh kandidat calon seperti menyangkut Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan, pelayanan hukum, dan isu-isu yang lain yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pada konteks ini pemilih pemula sudah cukup rasional untuk menentukan pilihan politiknya. Pemilih dalam kategori ini sudah tidak akan cenderung memilih kandidat berdasarkan pada aspek-aspek seperti

pendekatan agama, suku, tetapi pemilih yang rasional akan cenderung menganalisis program-program yang ditawarkan. Hubungan emosional juga mempengaruhi sikap pemilih pemula terhadap kandidat tertentu dalam menentukan keputusan memilih kandidat calon.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Chaidir Marasabessy, Nurdiyana, Setiawati dan Ichwani Siti Utami dengan judul penelitian “Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa; 1) Partisipasi pemilih pada ajang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di wilayah Benda Baru Pamulang sebanyak 18.982 jiwa atau mencapai 61 persen dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12.132 atau mencapai 39 persen, dari total jumlah jiwa pilih sebanyak 31.114 jiwa pilih. Sementara perilaku pemilih dalam menentukan hak politiknya masih didominasi oleh sosok figur dan politik uang (money politics). 2) Kekhawatiran warga akan keselamatan jiwa akibat penularan wabah Covid-19 yang menjadi faktor utama menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah di wilayah Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh rohendi dan faisal muzzamil dengan judul penelitian” Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta”

¹³⁹ berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Didasarkan atas hasil analisis terhadap data studi yang dikumpulkan, digali dan dikaji, maka ditemukan dua kesimpulan penting dalam studi ini, yaitu: ¹⁵ *Pertama*, kategori ¹⁰⁸ *Pemilih Pemula* pada Pilkada Jabar 2018 di Purwakarta adalah ¹⁰⁸ *pemilih dari kalangan remaja* yang berusia 17-20 tahun; *Kedua*, tipe ¹⁰⁸ *Pemilih Pemula* pada Pilkada Jabar 2018 di Purwakarta termasuk pada tipe *Pemilih Rasional*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nidya Syifa Agna Munthe dengan judul penelitian ¹⁰ "Partisipasi *Pemilih Pemula* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Saat Pandemi Covid-19" ⁸¹ hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil dari penelitian terhadap ¹⁰ *Partisipasi *Pemilih Pemula* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Saat Pandemi Covid-19* ¹⁰ membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan tetap menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Terbukti dengan besarnya harapan masyarakat terhadap pemimpinnya untuk membawa perubahan dalam 5 tahun masa jabatannya. Terkhusus kecamatan Medan Tembung dengan subjek partisipasi *pemilih pemula* masih di angka yang tinggi dan dapat lebih diarahkan untuk membentuk fondasi politik yang kuat.
8. Penelitian yang dilakukan oleh pameliana putri dan maya mustika kartika sari dengan judul penelitian " karakteristik pilihan politik *pemilih pemula*

di kabupaten sidoarjo” hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pilihan politik pemilih pemula. Adapun sikap pemilih pemula dalam menentukan pilihannya berorientasi pada kesimpulan dari landasan yang diangkat dalam penelitian ini diketahui orientasi pertama Karakteristik pilihan pemilih pemula di Kabupaten Sidoarjo dilihat berdasarkan latar belakang calon yang terbesar memilih karena latar belakang pendidikannya dengan persentase sebesar 55%, orientasi kedua Karakteristik pilihan pemilih pemula di Kabupaten Sidoarjo juga berdasarkan performan yang menarik dan dimiliki oleh kandidat calon kandidat dengan persentase sebesar 20%, Serta orientasi ketiga dilihat berdasarkan kesamaan identitas yaitu agama yang di anut antara responden terhadap calon kandidat dengan persentase sebesar 24%. Serta terdapat pula pemilih acak sebesar 1%.

103
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian yang dilakukan
I	Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan	Mengetahui kebijakan dalam memecahkan masalah (<i>policy-problem solving</i>)	(1) pemilih pemula di Kota Surabaya mengharapkan kontestan dituntut kontribusi besar menghadapi	Perbedaan jurnal dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, jurnal ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bertujuan untuk

	Kota Surabaya	jenis penelitian deskriptif.	bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan tinggi, sehingga pemilih pemula akan mempunyai kesetiaan, loyal, dan tidak akan merubah pilihan dari calon kepala daerah yang dipilih sesuai dengan apa yang diharapkan	<p>3 masalah pandemi Covid-19 selain pemerintah pusat. (2) karakter perilaku politik pemilih pemula pemilihan kepala daerah 2020 pada masa pandemi Covid -19 di Kota Surabaya menunjukkan sebagian besar pemilih pemula merupakan pemilih kritis yaitu sebanyak 34%. Hanya 20% pemilih pemula di Kota Surabaya yang merupakan pemilih tipe skeptis. Sisanya 24% merupakan pemilih tradisional dan 22% merupakan pemilih yang rasional.</p> <p>(3) Dari hal tersebut pada pemilih pemula di Kota Surabaya dengan tipe pemilih kritis</p>	<p>3 menimbulkan kepercayaan yang tinggi kepada pemilih pemula sehingga muncul kesetiaan untuk memilih sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter pemilih pemula yang rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Dan persamaanya adalah penelitian model deskriptif. Manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian ini adalah untuk bahan pertimbangan pengetahuan tentang karakter-karakter pemilih pemula.</p>
--	---------------	------------------------------	---	---	--

				<p>menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki faktor orientasi <i>policy problem solving</i> (kebijakan pemecahan masalah) dan faktor orientasi ideologi dalam memilih calon kontestan pemilihan kepala daerah Kota Surabaya 2020</p>	
2	<p>1</p> <p>Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 (Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten Tuban)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif</p>	<p>(1) Mengetahui pelaksanaan pilkada serentak 2020 era pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban,</p> <p>(2) Mengetahui implikasi Covid-19 dalam pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban.</p>	<p>Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tuban tahun 2020 merupakan pemilihan bersejarah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya di era pandemi Covid-19, Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemic Covid-19 ini pada dasarnya tidak mengubah teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dan</p>	<p>Perbedaan karya ilmiah diatas dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, pelaksanaan tahapan pilkada secara menyeluruh menjadi objek penelitian sedangkan penelitian ini fokus pada pemilih pemula. Kesamaanya adalah tentang lokasi penelitian ada di kabupaten Tuban, implikasi pandemi Covid-19 pada pelaksanaan pilkada dan sama sama menggunakan model penelitian</p>

				Teknis pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan, Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19.	deskriptif kualitatif. Manfaat penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai tambahan literasi tentang pilkada dimasa pandemi.
3	Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024	penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif	Mengetahui perilaku pemilih pemula yang ditemukan di kecamatan Campalagian dengan pendekatan yaitu : (1)pendekatan psikologis, (2)pendekatan <i>retrospectif</i> (melihat masa lalu) voting, (3)pendekatan sosiologis, dan (4)pendekatan pilihan rasional	(1) metodologi mental, sudut-sudut dalam metodologi mental yang mempengaruhi warga di sub-wilayah Campalagian dilacak sebagai bukti yang dapat dikenali dari kelompok-kelompok ideologis. Warga berkumpul dengan kelompok-kelompok ideologis yang mereka anggap siap untuk mengatasi kecenderungan mereka dan memilih pelamar yang disajikan oleh pertemuan-pertemuan ini. (2) peninjauan kembali dengan pendekatan	Perbedaan penelitian ini dengan jurnal di atas adalah terletak pada pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku pemilih, jurnal menggunakan pendekatan psikologis, pendekatan <i>retrospectif</i> (melihat masa lalu) voting, pendekatan sosiologis, dan pendekatan pilihan rasional. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan: rasional, emosional dan tradisional. Persamaanya adalah pada model penelitian deskriptif kualitatif. Karna sama sama membahas tentang pemilih pemula maka sangat bermanfaat untuk

			<p> pemungutan suara, bagian dari sejarah kemungkinan saat ini untuk Pejabat dan Pejabat Delegasi juga dipertimbangkan oleh pemilih dalam memutuskan keputusan mereka. Kelompok masyarakat Campalagian secara umum akan menilai presentasi pesaing saat ini untuk Pejabat dan Pejabat Agen, dengan asumsi mereka menilai bahwa pesaing telah menang di posisi sebelumnya atau telah memberikan manfaat melalui strateginya, mereka akan memilih pelamar tersebut. (3) metodologi humanistik, pendekatan ini mempengaruhi </p>	<p> menambah literasi tentang penelitian yang dilakukan sekarang </p>
--	--	--	---	---

				<p>perilaku pemilih sejauh identitas dan bagian dari ikatan keluarga. Di daerah pedesaan di Campalagian, ditemukan warga negara tahap awal atau pemilih konvensional, yang mengambil keputusan berdasarkan alasan tahap awal, misalnya, identitas dan ikatan keluarga. (4) pendekatan keputusan yang waras, sudut pandang ini menunjukkan suatu langkah maju dimana terdapat individu Campalagian yang memilih berdasarkan pertimbangan yang matang, misalnya visi dan misi serta program kerja yang dihadirkan oleh pertandingan-pertandingan up-and-comer.</p>	
--	--	--	--	--	--

				Kapasitas pemilih untuk secara bijaksana memilih konsekuensi dari sosialisasi dan korespondensi politik yang didapat dan kemudian digunakan sebagai alasan untuk mengambil keputusan adalah tahap menuju warga yang cerdas di Campalagian.	
4	10 Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara	Penelitian menggunakan metode jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara	(1) Hasil penelitian ini menggambarkan, Program-program yang ditawarkan oleh kandidat calon seperti menyangkut Kesehatan, Pendidikan, kemiskinan, pelayanan hukum, dan isu-isu yang lain yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara	Perbedaan jurnal terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah terletak pada lokus dan pokok bahasan, jurnal membahas tentang partisipasi pemilih pemula sedangkan penelitian ini membahas tentang karakteristik pemilih pemula, keduanya sama-sama membahas tentang pemilih pemula yang mana menjadi hal unik untuk diteliti. Manfaat untuk

			<p>keseluruhan. Pada konteks ini pemilih pemula sudah cukup rasional untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Pemilih dalam kategori ini sudah tidak akan cenderung memilih kandidat berdasarkan pada aspek-aspek seperti pendekatan suku, agama, , tetapi pemilih yang rasional akan cenderung menganalisis program-program yang ditawarkan dan dipromosikan secara terus menerus pada saat kampanye.</p> <p>(2) Hubungan emosional juga mempengaruhi sikap pemilih pemula terhadap kandidat tertentu dalam menentukan keputusan memilih kandidat calon</p>	<p>penelitian ini adalah sebagai pertimbangan literasi ilmiah untuk penelitian pemilih pemula.</p>
--	--	--	--	--

5	<p>7</p> <p>Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemic covid-19</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif</p>	<p>Mengetahui Partisipasi pemilih pada ajang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di wilayah kota Tangerang.</p>	<p>7</p> <p>1) Partisipasi pemilih pada gelaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 di wilayah Benda Baru Pamulang sebanyak 18.982 orang atau mencapai 61 persen dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12.132 atau mencapai 39 persen, dari total jumlah jiwa pilih sebanyak 31.114 jiwa pilih. Sementara perilaku pemilih dalam menentukan hak politiknya masih didominasi oleh sosok figur dan politik uang (money politics). 2) Kekhawatiran warga akan keselamatan jiwa akibat penularan wabah Covid-19 yang menjadi faktor utama menurunnya partisipasi masyarakat</p>	<p>Perbedaan jurnal terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah: wilayah lokus penelitian pada jurnal berada di kota tangerang dan tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi, sedangkan penelitian ini lokus penelitiannya di kabupaten tuban dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui karakteristik pemilih pemula. Penelitian dan jurnal ini memiliki kesamaan dalam metode penelitian yaitu penelitian kualitatif.</p>
---	--	---	--	--	--

				7 dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah di wilayah Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan	
6	15 Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta	Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.	Tujuan dari studi ini secara spesifik untuk dua kegunaan: <i>Pertama</i> , secara teoretis Hasil studi ini berguna untuk mengembankan teori tentang kajian Politik di kalangan remaja. Dalam konteks teoretis, hasil studi ini diharapkan bisa mengelaborasi tipe-tipe pemilih atau pemberi suara	Didasarkan atas hasil analisis terhadap data studi yang dikumpulkan, digali dan dikaji, maka ditemukan dua kesimpulan penting dalam studi ini, yaitu: <i>Pertama</i> , ¹⁵ kategori Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 di Purwakarta adalah pemilih dari kalangan remaja yang berusia 17-20 tahun; <i>Kedua</i> , ¹⁵ tipe Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 di Purwakarta termasuk pada tipe Pemilih Rasional.	29 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah tentang tujuan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan mengembangkan teori tentang politik di kalangan remaja dan mengetahui realitas di masyarakat untuk menentukan pilihan. Kesamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu penelitian pada pilkada di suatu daerah. Manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian saat ini adalah mengetahui tipe-tipe pemilih di kabupaten purwakarta sehingga bisa

			<p>berdasarkan kondisi realitas pada suatu masyarakat..</p> <p><i>Kedua</i>, secara praktis, Hasil studi berguna sebagai panduan dalam melakukan strategi kampanye politik dan pendidikan politik yang sesuai dinamika kalangan remaja. dan dapat dijadikan gambaran umum tentang kecenderungan pilihan politik kalangan remaja.</p>		menjadi perbandingan dengan pemilih di kabupaten Tuban.
7	<p>10</p> <p>Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode “<i>mix method</i>”</p>	<p>1. Peneliti melihat bahwa semangat peduli dan ingin berpartisipasi</p>	<p>Hasil dari penelitian terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan jurnal penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian,</p>

	Medan Tembung Saat Pandemi Covid-19	<p>10 i pada politik yang dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah baik itu Pemilu ataupun Pilkada harus diarahkan sebaik mungkin.</p> <p>2. Merupakan penilaian terhadap strategi pemerintah daerah dan KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan.</p>	<p>10 Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Saat Pandemi Covid-19 membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan tetap menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Terbukti dengan besarnya harapan masyarakat terhadap pemimpinnya untuk membawa perubahan dalam 5 tahun masa jabatannya. Terkhusus kecamatan Medan Tembung dengan subjek partisipasi pemilih pemula masih di angka yang tinggi dan dapat lebih diarahkan untuk membentuk fondasi politik yang kuat.</p>	<p>165 saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode "mix method" yaitu campuran metode kuantitatif dan kualitatif, kesamaanya adalah penelitian dilakukan saat pandemi covid-19 dan penelitian tentang pemilih pemula di gelaran pilkada. Manfaat penelitian terdahulu adalah sebagai tambahan literasi terkait, pilkda, pemilih pemuda dan covid-19.</p>
--	-------------------------------------	---	--	---

8	Karakteristik pilihan politik pemilih pemula di kabupaten Sidoarjo	Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. dengan penentuan responden menggunakan teknik random sampling	Mengetahui Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula di kabupaten Sidoarjo,	Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pilihan pemilih pemula. Adapun sikap pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya berorientasi pada latar belakang pasangan calon, pemilih yang memilih karena latar belakang pendidikan paslon dengan persentase sebesar 55%, orientasi kedua Karakteristik pilihan pemilih pemula di Kabupaten Sidoarjo juga berdasarkan performance menarik yang dimiliki oleh kandidat pasangan calon dengan persentase sebesar 20%, Serta orientasi ketiga dilihat berdasarkan kesamaan identitas yaitu	Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian terdahulu yang relevan adalah: pada metode penelitian, terdahulu kualitatif dengan responden yang sudah di tentukan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan deskriptif kualitatif yang mewawancarai responden secara acak, kesamaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang fokus pada pemilih pemula dan penelitiannya sama yaitu pilkada di tahun 2020. manfaat dari penelitian terdahulu untuk penelitian saat ini adalah; sebagai tambahan pertimbangan penelitian tentang pemilih pemula yang dilakukan peneliti saat ini.
---	--	---	--	--	---

				agama yang dimiliki antara responden terhadap calon kandidat dengan persentase sebesar 24%. Serta terdapat pula pemilih acak sebesar 1%.	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel ⁷⁷ penelitian terdahulu yang relevan diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dari dari delapan penelitian terdahulu yang relevan diatas, maka persamaan, perbedaan dan manfaat dengan penelitian saat ini adalah sama membahas tentang pemilih pemula, sama membahas tentang pilkada, dan sama penelitian dilaksanakan saat pandemi covid-19. Perbedaan terletak pada lokus dan waktu penelitian, pada metode penelitian ada kesamaan dan ada juga perbedaan dengan peneltian yang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu yang relevan sangat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan saat ini terutama dalam tambahan literasi tentang pemilih pemula, beberapa penelitian yang sudah dilakukan didasarkan pada klasifikasi umur, gender, status sosial, ekonomi, agama dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan rasional, emosional, dan tradisional untuk mengetahui karakteristik pemilih pemula pada ¹ pilkada serentak 2020 era pandemi covid-19 di kabupaten Tuban. Adapun ¹⁶⁷ lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penggunaan Pendekatan Rasional, Emosional dan Tradisional

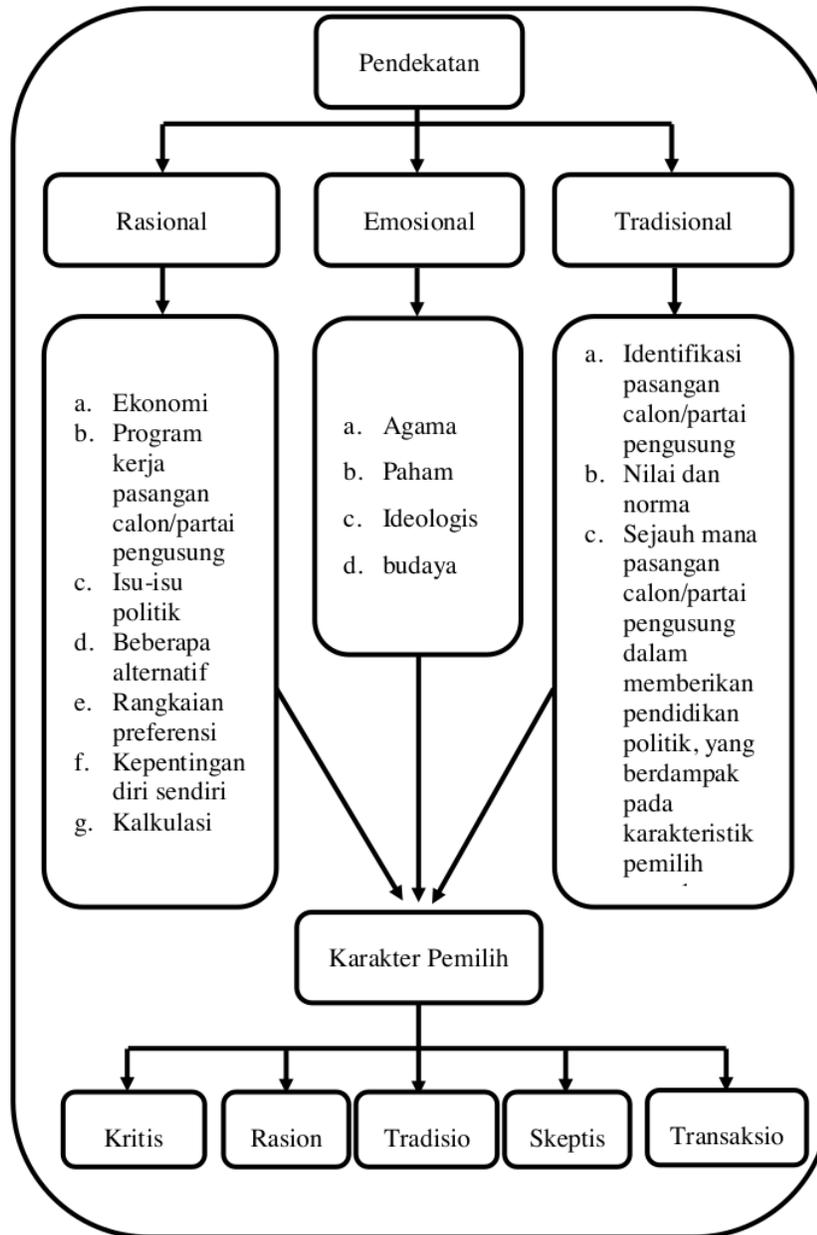
Pendekatan Rasional	Pendekatan Emosional	Pendekatan Tradisional
<ul style="list-style-type: none"> a. Ekonomi b. Program kerja pasangan calon/partai pengusung c. Isu-isu politik d. Beberapa alternatif e. Rangkaian preferensi f. Kepentingan diri sendiri g. Kalkulasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Agama b. Paham c. Ideologis d. Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasangan calon/partai pengusung b. Nilai dan norma c. Sejauh mana pasangan calon/partai pengusung dalam memberikan pendidikan politik, yang berdampak pada karakteristik pemilih pemula d. Kampanye Paslon e. Media komunikasi

129

Adapun lebih jelas bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Pendekatan Rasional, Emosional dan Tradisional



2.2 Kajian Teori

Penelitian yang berjudul Karakteristik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Era Pandemi Covid-19 memiliki 3 (tiga) kajian teori yang akan dipakai, yaitu Teori Demokrasi, Teori Partai Politik dan perilaku pemilih. Berikut ini merupakan pembahasan dari ketiga teori yang akan dipakai oleh peneliti untuk menganalisis dan membahas terkait hasil-hasil penelitian:

2.2.1 Teori Demokrasi

Demokrasi secara umum diartikan sebagai sebuah konsep pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. Kata ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat ikut berperan serta dalam pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam negara.

Demokrasi sendiri dijabarkan oleh banyak ahli dengan definisi yang berbeda-beda, diantaranya beberapa penjabaran ahli tentang demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Charles Costello, menjabarkan demokrasi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
- b. Abraham Lincoln, menjabarkan demokrasi sebagai sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

- c. Meriam, demokrasi dijabarkan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang khususnya oleh mayoritas, pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
- d. Hannry B. Mayo, demokrasi dijabarkan sebagai kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggaran dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
- e. Hans Kelsen, menjabarkan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- f. Sidney Hook, demokrasi dijabarkan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsungatau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- g. C.F. Strong, demokrasi dijabarkan sebagai suatu sistem pemerintahan

dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah pada akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Berbagai macam definisi yang sudah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat.

Setiap warga negara di dunia tentunya mendambakan suatu pemerintahan yang demokratis, asumsinya bahwa pemerintahan yang demokratis dapat memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Saat ini demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh masyarakat dunia sebagai sistem terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Negara Indonesia biasa disebut juga dengan negara demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan (2012: 143) bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi. Demokrasi yang dimiliki merupakan perwujudan negara hukum dalam bentuk modern di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban bangsa dan menjaga perdamaian di dalam negaranya. di Indonesia, pemimpin yang berwenang membuat hukum adalah badan legislatif terdiri dari Majelis ²⁶ Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD). Hukum yang legitimate adalah hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam membuat hukum. Oleh karenanya, setiap anggota yang duduk di kursi MPR, DPR, DPD seharusnya adalah orang yang paham hukum. Sebagaimana salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, peraturan yang dibuat haruslah yang dapat dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Tentunya pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Budiardjo dalam Yuniarto (2018: 9) penelitian UNESCO tahun 1949 bahwa demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Lebih empiris-aplikatif, Hornby dalam Yuniarto (2018: 10) mengemukakan di dalam bukunya *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan bahwa "democracy" adalah : *a. Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; b. Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. c. Society in which there is treatment of each other by citizens as equals"*

Makna tersebut adalah bahwa demokrasi merujuk kepada konsep

kehidupan negara yang warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Dalam implementasinya bahwa konsep dan nilai demokrasi tersebut yang dikatakan Robert Dahl dalam Yuniarto (2018: 11) bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi (*polyarchy*), yakni:

- 1) Adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi;
- 2) Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat;
- 3) Kebebasan memilih dalam pemilu;
- 4) hak menduduki jabatan publik;
- 5) Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh suara rakyat;
- 6) Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;
- 7) Adanya pemilu yang bebas dan adil;
- 8) Adanya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara dalam pemilu dan ekspresi pilihan lainnya.

Selain itu, demokrasi merupakan konsep yang memiliki sifat multidimensi.

Hal ini tergambar dari pemahaman konsep demokrasi yang diadopsi CISED yakni:

“Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed” (Yuniarto, 2018:11).

CICED memandang secara konseptual demokrasi sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Sanusi dalam Yuniarto (2018:12) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945 yakni: "Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan supremasi hukum (*Rule of Law*), Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial".

1. Kesadaran atas Pluralisme

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.

2. Musyawarah

Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan

menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.

4. Kerjasama

Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah “joglo” yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).

6. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan

cara yang ditempuh untuk meraihnya.

7. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuaian konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (*perbedaan*) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena berbicara tanpa perilaku.

2.2.2 Demokrasi di Indonesia

Menurut Miriam Budiardjo (2008) mengungkapkan bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirinya terdapat berbagai penafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-undang Dasar 1945 kita secara eksplisit menyebutkan dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak didasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

2. Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutism*).

Berdasarkan dua istilah diatas *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, sudah sangat jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dalam Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen adalah demokrasi konstitusional, Oleh karenanya corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, sejak berdirinya Republik Indonesia, permasalahan pokok yang dihadapi adalah bagaimana didalam masyarakat yang beragam ini, baik dari budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi didamping itu juga membina kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Permasalahan tersebut berkisaran pada penyusunan suatu sistem politik yang mana pemimpin cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan pelibatan partisipasi masyarakat seraya menghindari timbulnya diktator, baik diktator yang bersifat perorangan, partai ataupun militer.

2.2.3 Sistem Demokrasi di Indonesia

Dianutnya sistem demokrasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ³⁷ Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk

mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Sistem demokrasi di Indonesia dikelompokkan menjadi 5 (lima) periode demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Era Revolusi Nasional (1945-1949)

Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer, dengan kehadiran banyak partai. Ternyata kabinet jarang dapat bertahan lebih dari satu tahun karena ulahnya partai-partai. Keadaan ini menimbulkan keinginan untuk memperkuat badan eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multi partai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara. Hal itu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II. Kondisi demikian ini berlangsung sampai pada tahun 1947.

2. Demokrasi di Era Liberal (1950-1959)

Dalam periode ini belum dapat diterapkan pola pelaksanaan demokrasi seutuhnya, karena belum tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi dalam bidang pemerintahan dan masyarakat secara jelas, kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal.

Seiring dengan fenomena itu lembaga eksekutif berada pada posisi yang “kalah kuat” dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil. Sesudah berdirinya RIS walaupun negara sudah mendapat pengakuan internasional, tetapi pelaksanaan demokrasinya baru dilakukan dalam tahap lapisan kaum politisi yang jumlahnya masih sangat terbatas begitu juga pengalaman tentang pelaksanaan demokrasi juga masih sangat minim.

3. Demokrasi di Era Terpimpin (1959-1965)

Sistem multipartai dalam kerangka penerapan demokrasi liberal menguasai perkembangan politik selama sepuluh tahun dan berakhir akibat timbulnya paham demokrasi terpimpin. Ketika pada 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin, Pada era ini konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter, di dalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rezim yang otoriter. Selain Soekarno, ada 2 (dua) kekuatan politik yang masih dapat berperan adalah Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, menutup kebebasan pers serta membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal. Pada demokrasi terpimpin ini, semua

anggota dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPR-GR) dan majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS) diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Dia berusaha keras untuk menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Tiga pilar utama partai politik yang mewakili Nasakom adalah PNI, PU dan PKI.

Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden, Soekarno. Ketua DPR, MPR, BPK, MA diangkat sebagai pembantunya dengan jabatan sebagai menteri. Semua kepala staf (AD-Angkatan Darat, AL-Angkatan Laut, AU-Angkatan Udara) dan kepolisian juga diangkat sebagai menteri. Dengan kekuasaan yang terpusat ini, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup tanpa didampingi oleh wakil presiden. Dalam ketetapan MPRS NO. III tahun 1963, Pasal I menyatakan: Dr. Ir. Haji Soekarno (Bung Karno), Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi: Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Namun, demokrasi terpimpin dan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak berlangsung lama. Tragedi G.30 S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) yang membuat semuanya berakhir. Pasca tragedi G 30 S/PKI, Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan.

Masa demokrasi terpimpin banyak memberikan bahan-bahan berharga

sebagai pelajaran dan pengalaman untuk pelaksanaan demokrasi, mungkin lebih dari pada periode-periode sebelumnya, karena dalam periode tersebut terdapat suatu pola yang dilaksanakan secara konsekuen, walaupun dengan meninggalkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan tidak perlu di ingkari, bahwa boleh dikatakan sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia seolah-olah terpesona dan terseret di dalamnya.

4. Demokrasi di Era Orde Baru (1966-1998)

Ketika pemerintah Orde Baru naik ke pentas politik nasional, negara Indonesia sedang menghadapi krisis luar biasa dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik krisis itu ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar dan ormas-ormas *onderbouw* parpol yang hidup dalam tekanan ketika era demokrasi terpimpin. Sedangkan dibidang ekonomi ditandai oleh sulitnya didapat keperluan sehari-hari dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, kekuasaan selama masa orde baru yang menggambarkan wajah buram demokrasi. Dalam perjalanan sejarah, Soekarno tetap menjadi presiden sampai munculnya Orde Baru atau runtuhnya demokrasi terpimpin yang dibangun Soekarno sendiri. Meski bentuk atau sistem pemerintahannya berganti-ganti, Soekarno tetap menjadi presiden. Seperti terlihat bahwa ketika sistem pemerintahan berganti dari presidensial ke parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, dengan kedudukan sebagai kepala negara

yang tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, bersifat simbolik dan seremonial, begitupun ketika bentuk negara Indonesia berubah dari Republik menjadi negara Federal. Berdasarkan UUD RIS 1949 bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan UUD Sementara 1950, Soekarno dan Moh. Hatta juga tetap menjadi presiden dan wakil presiden.

Demokrasi Pancasila ialah ³⁷ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila ³⁷ Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dapat pula diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga lainnya, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Indonesia.

Jatuhnya orde lama yang digantikan orde baru, ditandai dengan ikut sertanya para teknokrat dari dunia akademis di dalam pemerintahan dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya orde baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter, Proses lembaga Konstituante

mengalami kegagalan karena dipicu berbagai pertimbangan politik sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, dapat diyakini bahwa ada tuduhan yang kuat dan sah, ternyata UUD 1945 sejak ditetapkan sampai dengan periode Orde Baru tahun 1966 selalu dibawah tekanan/paksaan politik kekuasaan yang kuat saat itu. Artinya proses penerimaannya sebagai UUD (konstitusi) tidak dengan cara-cara konstitusional dan terencana secara matang dan transparan. Hal ini tentu memiliki pengaruh yang negatif bagi penegakannya.

Wujud politik Orde Baru sampai dengan pasca pemilu 1997 adalah tidak demokratis atau cenderung otoriter dengan tumpuan kekuatan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi. Terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan dengan dalih membangun stabilitas nasional sebagai prasyarat kelancaran pembangunan ekonomi, Periode Orde Baru (1966-1998) menampilkan wujud politik non demokratis. Dengan catatan pada awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan wujud pemerintahan yang demokratis, namun kemudian berlangsung sangat otoriter dan represif, sehingga pemerintahan tidak berjalan secara demokratis.

Dibawah Orde Lama yang semula secara permukaan memperlihatkan kekuatan politik Soekarno ternyata terdapat polarisasi politik yang sangat tajam dan bergelora sehingga meledak dalam krisis politik pada tahun 1965/1966. Sebaliknya di bawah Orde Baru elemen-

elemen disintegrasi dapat dieliminasi sehingga stabilitas nasional senantiasa mantap dan pembangunan ekonomi menampakkan hasil secara memuaskan, tetapi dengan kehidupan politik yang tidak demokratis.

5. Demokrasi di Era Reformasi (1999-2009)

Pelaksanaan pemilihan umum 1999 yang disiapkan dalam waktu singkat, terlaksana dengan relatif bebas, jujur dan adil khususnya jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya pada rezim orde baru. Meskipun demikian, pemilu tahun 1999 merupakan rancangan awal menuju kearah terbentuknya tatanan politik yang demokratis, suatu tatanan politik yang mampu menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat sebagai cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat. Garis hitam tebal pemisah antara periode kelim Orde Baru dengan Era Reformasi adalah dikembalikannya kedaulatan rakyat ke tangan rakyat sejak tanggal 21 Mei 1999 setelah lebih dari tiga dekade dikangkangi oleh pemerintahan orde baru, Pemilu presidensial langsung yang pertama kali dalam sejarah Indonesia modern, keputusan kolektif nasib bangsa. Setidaknya terdapat 3 pihak yang sangat membahayakan proses pembangunan demokrasi, yaitu militerisme, kerajaan bisnis konglomerat hitam dan serangan kelompok Soeharto.

6. Demokrasi di Era Reformasi (2009-sekarang)

Dalam Pemilihan Umum 2009, ada permasalahan hasil pemilihan

umum yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan dari para kandidatnya yang curang, kekhilafan yang dilakukan oleh petugas Pemilihan Umum dan lain-lain. Pemilihan umum 2014 berlangsung relatif bebas, demokratis dan damai. Hampir tidak ada gejala politik yang menonjol terkait kekecewaan partai politik, kelompok pemilih, para caleg dan pihak lainnya atas kekalahan mereka dalam kompetisi demokratis yang berlangsung 5 (lima) tahunan tersebut. Ditinjau dari aspek proses penyelenggaraannya, sebagian persoalan krusial pemilihan umum seperti pernah muncul dalam pemilu-pemilu sebelumnya ternyata muncul dan terulang kembali, termasuk soal akurasi daftar pemilih, baik daftar pemilih sementara atau tetap, maupun daftar pemilih khusus dan tambahan. Sementara hasil pemilu dan peta politik justru semakin mempertajam fragmentasi politik di parlemen seperti jumlah partai politik memperoleh kursi bukannya berkurang, tetapi sebaliknya justru bertambah dari 9 (sembilan) menjadi 10 (sepuluh) partai politik.

¹¹
Tabel 2.2.3

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi	Periode
Konfigurasi politik demokratis yang dilandaskan pada demokrasi liberal	Era Revolusi Nasional (1945-1959)
	Era Liberal (1950-1959)
Konfigurasi Otoriter yang dilandaskan Demokrasi Terpimpin	Era Terpimpin (1959-1965)

<p>46</p> <p>Konfigurasi politik non demokratis. Dengan catatan, di awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan konfigurasi politik yang demokratis</p>	<p>46</p> <p>Orde Baru (1966-1998)</p>
<p>Demokrasi Pancasila</p>	<p>Era Reformasi (1999-2000)</p>
<p>Demokrasi Pancasila</p>	<p>Orde Reformasi (2009-sekarang)</p>

Perbedaan demokrasiya yaitu memasuki periode era reformasi pada pemilihan umum tahun 2004, dimana pada pelaksanaannya rakyat tidak hanya memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) saja, tetapi juga memilih anggota dewan perwakilan daerah (DPD) serta presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat walaupun dilaksanakan pemilihan legislatif dahulu dibanding pemilihan presiden.

Dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan demokrasi yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung terkait cara pemilihan pada saat pemilihan umum. Namun, pada pemilihan umum 2004 terjadi pergantian demokrasi perwakilan (tidak langsung) menjadi langsung yaitu problematik sistem presidensil yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang kemudian berpotensi menghasilkan situasi *deadlock* dalam relasi presiden dan parlemen sehingga berdampak pada instabilitas demokrasi presidensil.

Ironisnya, fenomena itulah yang terjadi di Indonesia pasca Soeharto, sistem presidensil berlangsung bersamaan dengan system multipartai, problematik kombinasi antara presidensialisme dan sistem multipartai tidak

hanya berlangsung pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, melainkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fragmentasi dan polarisasi kekuatan partai di DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004 menggambarkan dengan jelas potensi problematik sistem dan praktik presidensialisme pasca Soeharto.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum bahwa pelaksanaan Pemilu serentak dengan upaya penguatan sistem presidensial multipartai di Indonesia. Selain menimbulkan efek ekor jas (*coattail effect*) yang bisa melahirkan hasil Pemilu yang kongruen, di mana Presiden terpilih besar kemungkinan akan mendapat dukungan yang memadai atau koalisi yang kuat. Hal tersebut disebabkan koalisi dibangun sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga akan tercipta koalisi yang lebih solid. Koalisi yang solid tersebut sekaligus bisa menjadi jawaban inkompatibilitas sistem presidensial dengan multipartai sebagaimana dianut di Indonesia.

2.2.4 Teori Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar –dasar Ilmu Politik” pengertian partai politik adalah : Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo,2004:160)

Definisi di atas senada dengan pendapat R.H Soltau yang tertulis dalam buku Miriam Budiardjo dengan judul buku “Dasar -dasar Ilmu Politik“ sebagai

berikut: “*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*” (“sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”) (Soltau dalam Budiardjo, 2004:160)

Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh H.B Widagdo dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi” yaitu: “*A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out the general policies*”. (“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”).

Definisi yang sudah diutarakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik pada hakikatnya adalah sebuah organisasi perjuangan nilai atau ideologi yang terorganisir untuk meraih kekuasaan. Partai politik dalam sebuah negara menjadi saluran untuk menegosiasikan antara masyarakat dan negara. Kehadiran partai politik tentu akan menjadi bagian dari pemilihan umum untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Selain

itu, partai politik ini juga menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat melalui personal- personal partai politik yang duduk dalam jabatan pemerintahan. Semuanya itu tidak bisa lepas dari asal-usul partai politik.

Secara umum, ada tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik menurut Pamungkas dalam Surbakti (2010). *Pertama*, teori institusional (*kelembagaan*). Teori ini melihat bahwa ada korelasi antara kehadiran parlemen dengan lahirnya partai politik. Dengan demikian penekannannya adalah terletak pada adanya perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan diparlemen. Menurut teori ini, partai politik dibentuk karena adanya kebutuhan jaringan komunikasi antara anggota parlemen dengan masyarakat. Sementara masyarakat yang tidak puas dengan partai yang dibentuk oleh parlemen, akan membentuk partai baru sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang tidak diakomodir oleh partai yang dibentuk oleh parlemen. *Kedua*, teori historis. Teori ini menekankan pada krisis-krisis sistemis yang berkaitan dengan proses pembangunan bangsa. Krisis ini berkaitan dengan integrasi nasional, legitimasi dan tuntutan partisipasi yang lebih luas. Jadi menurut teori ini, partai politik terbentuk sebagai respon atas krisis politik yang terjadi. *Ketiga*, teori modernisasi pembangunan politik. Teori ini mengasumsikan bahwa hadirnya partai politik sebagai produk dari modernisasi sosial. Kelompok-kelompok sosial baru mencari akses yang lebih langsung untuk masuk dalam proses politik sebagai dampak dari industrialisasi.

Fungsi partai politik berangkat dari realitas empirik dan melalui evolusi dalam rentang waktu yang panjang. Pada suatu kondisi tertentu, bisa saja partai

menjalankan fungsinya demi penguatan sistem demokrasi, akan tetapi jika situasinya berubah maka bisa saja fungsi tadi tidak lagi digunakan atau ditinggalkan karena situasinya berbeda. Menurut Almond (dalam Mas'ood dan Mac Andrews, 2006, hal. 64) mengenai fungsi partai politik. *Pertama*, sebagai pelaksana sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan-pilihan politik masyarakat sekaligus untuk menanamkan indoktrinasi ideologi politik partai kepada calon-calon pemilih agar tercipta sikap loyalitas yang kuat. *Kedua*, wadah partisipasi politik. Artinya partai digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses dan keputusan politik. *Ketiga*, rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan baik untuk mengisi jabatan khusus dalam organisasi partai atau untuk kontestasi di dalam pemilihan umum dalam rangka menduduki jabatan politis. *Keempat*, komunikasi politik. Komunikasi politik dimaksudkan adalah penyampaian informasi, isu dan gagasan politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah. *Kelima*, artikulasi kepentingan. Bagian ini berkaitan dengan bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat yang diserap oleh ⁸⁸ partai dapat diajukan kepada pemerintah. *Keenam*, agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan dari beragam kelompok kepentingan digabungkan menjadi alternative-alternative kebijakan pemerintahan. *Ketujuh*, pembuatan kebijaksanaan. Biasanya partai pemenang akan membuat kebijakan politik terkait dengan kepentingan partainya, dalam hal ini terkait dengan program, nilai atau ideologi partainya.

2.2.5 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000), Voting adalah: “Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikansuaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”. Perilaku memilih (*voting behavior*) menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano: 1985)

Budiarjo (2001) mendefinisikan *voting behavior* sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.

Ada dua macam teori *voting behaviour* yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar. *Pertama*, pendekatan voting dari mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. *Kedua*, pendekatan voting dari mazhab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center (Gaffar, 1992:4-9). Menurut Muluk

(2012) kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar sebagai pemilih untuk melakukan pencoblosan melalui surat suara.

Susanto (1992) mengartikan *voting behavior* adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Hubungan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam Pemilu, menurut Asvi Warman (1999), dijelaskan bahwa paling sedikit ada dua model yang menjelaskan mengapa orang memilih sebuah partai. Pertama pendekatan sosiologis dan psikologis.

Menurut Asfar (2006) pendekatan perilaku memilih (*Voting Behavior*) selama ini selain didasarkan dua model atau pendekatan, yaitu pendekatan sosiologidan pendekatan psikologi, ada pula pendekatan rasional. Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (1983) menyatakan terdapat 3 model pendekatan di dalam perilaku memilih (*votingbehavior*), yakni, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Mazhab sosiologis pada mulanya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia`s University Bureau of Applied Social Science*), sehingga lebih populer dengan kelompok Colombia.

Kelompok ini melakukan penelitian tentang *The People's Choice* pada tahun 1948 dan Voting pada tahun 1952. Di dalam dua karya tersebut mengungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti, afiliasi etnis, sosial ekonomi, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain.

Metodologi humanistik digambarkan sebagai panduan pertemuan lokal dan setiap pertemuan dipandang sebagai alasan bantuan untuk pihak tertentu. Silaturahmi ini dapat didasarkan pada orientasi (wanita dan pria), usia (muda dan tua). Itu juga dapat didirikan pada asosiasi formal dan kasual. Metodologi humanistik mengharapkan bahwa kecenderungan politik, serta kecenderungan pemilihan suara, adalah hasil dari kualitas keuangan, seperti pekerjaan, kelas filsafat dan agama t. Menurut Hadi (2006), metodologi humanistik pada dasarnya masuk akal bahwa kualitas sosial dan pengelompokan sosial memiliki dampak besar dalam menentukan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikembangkan oleh mazhab Michigan Efriza (2012). *The Survey Center* di Ann Arbor yang memfokuskan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) lebih menekankan pada Pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menjatuhkan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sosialisasi dan sikap dalam menjelaskan perilaku seseorang.

Mazhab ini awalnya dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey

Universitas Michigan (*University of Michigan`s Survey Research Centre*) sehingga golongan ini dikenal dengan sebutan golongan Michigan. Hasil penelitian golongan ini yang dikenal luas adalah *The Voter`s Decide* dan *The American Voter*. Menurut Richard Rose dan Lan MC. Alliser (1977) Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik (identitas partai), orientasi terhadap opini yang berkembang dan orientasi pada seorang kandidat.

Campbell (2000) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah (*Funnel of Causality*) cerobong kausalitas. Pengandaian itu dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model terletak paling atas dari "*funnel*"(Cerobong). Digambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial (ras, agama, etnik, daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap berikutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik.

Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi Kelompok Michigan adalah

identifikasi kepartaian dan isu-isu politik yang berkembang dan para calon, dan bukan latar belakang sosial atau budayanya.

Menurut pendekatan psikologis (Efriza, 2012) ada beberapa faktor psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: Identifikasi partai orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Pendekatan psikologis sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan *voting behavior* pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Disamping itu, evaluasi kepada kandidat ⁵ sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sejarah kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, integrasi dan kompetensi kandidat

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomiyang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya "*An Economic Theory of Democracy*" (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul "*A Theory of the Calculus Voting*", (1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon presiden maupun anggota parlemen.

Sedangkan untuk tipologi atau karakteristik pemilih terbagi menjadi lima yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1. Pemilih Rasional

Pemilih ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* (kebijakan pemecahan masalah) dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan .

Tabel 2.2.5
Indikator Pemilih Rasional

	Indikator
Pemilih Rasional	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemilih mempunyai orientasi yang besar pada <i>'policy-problem-solving'</i> dan berorientasi kecil untuk faktor ideologi. b. Faktor seperti faham, nilai tradisional, asal usul, agama, budaya dan psikografis memang dipertimbangkan pada pemilih tipe rasional ini, tapi bukan hal yang signifikan. c. Pemilih ini lebih mengedepankan kemampuan partai politik/peserta pemilu atau calon kontestan dalam program kerjanya d. Program kerja (platform) dilihat dari: a. kinerja partai dimasa lampau. b. Tawaran program guna menyelesaikan permasalahan nasional yang ada.

2. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan.

Tabel 2.2.5
Indikator Pemilih Kritis

	Indikator
Pemilih Kritis	<p data-bbox="646 499 678 527" style="text-align: center;">11</p> <p data-bbox="613 520 1192 688">a. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara besarnya orientasi pada kemampuan pasangan calon atau partai pengusung dalam menuntaskan permasalahan daerah, maupun besarnya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.</p> <p data-bbox="613 688 1192 825">b. Ikatan ideologis membuat loyalis pemilih tipe kritis ini terhadap seorang pasangan calon atau partai pengusung cukup tinggi dan tidak semudah 'rational voter' untuk berpaling ke pasangan calon yang lain.</p> <p data-bbox="613 825 1192 993">c. Pemilih menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan kepada pasangan calon atau partai pengusung, kemana mereka akan berpihak. Selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan sudah di janjikan.</p> <p data-bbox="824 982 857 1010" style="text-align: center;">13</p> <p data-bbox="613 1003 1192 1171">d. Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon atau partai pengusung, kemudian mereka mencoba memahami azas-azas dan faham yang melatarbelakangi pembuatan suatu kebijakan.</p> <p data-bbox="613 1171 1192 1276">e. Pemilih selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat para pasangan calon.</p> <p data-bbox="613 1276 1192 1409">f. Jika ada perbedaan nilai ideologi pasangan calon dengan platform partai pengusung, maka mereka memberikan kritik internal, dan membuat pilihan baru sesuai pertimbangan yang rasional.</p>

3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu

yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawarlagi.

Tabel 2.2.5

Indikator Pemilih Tradisional

	Indikator
<p>25 Pemilih Tradisional</p>	<p>a. Pemilih jenis ini mempunyai orientasi ideolog yang tinggi.</p> <p>b. Pemilih tipe tradisional ini tidak terlalu memandang kebijakan pasangan calon atau partai pengusung sebagai sesuatu yang urget dalam pengambilan keputusan</p> <p>c. Pemilih tradisional lebih mengutamakan kedekatan sosial-budaya, paham, nilai dan Agama sebagai ukuran dalam memilih pasangan calon.</p> <p>d. Pemilih jenis ini mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos, dan nilai sejarah dari pasangan calon atau partai pengusung.</p> <p>e. Pemilih jenis ini rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.</p> <p>f. Pemilih jenis ini yang bisa dimobilisasi oleh pasangan calon selama periode kampanye.</p> <p>g. Pemilih jenis ini mempunyai loyalitas yang tinggi.</p> <p>h. Apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin adalah sebuah kebenaran yang sulit dibantah dan harus di jalankan.</p>

	<p style="text-align: right;">23</p> <p>i. Pemilih tipe ini memandang ideologi sebagai suatu landasan dalam mengambil keputusan serta bertindak, serta terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat.</p>
--	--

4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara. Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nantinya harus bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih di atas mau mendukung mereka dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah (PILKADA) nanti.

Tabel 2.2.5

Indikator Pemilih Skpetis

Pemilih Skeptis	Indikator
	<p style="text-align: center;">17</p> <p>a. Pemilih tipe ini tidak memiliki orientasi ideolog</p>

	<p>yang besar dengan sebuah pasangan calon atau partai pengusung, dan tidak menjadikan kebijakan sebagai hal yang penting untuk bahan pertimbangan.</p> <p>b. Keinginan terlibat dengan kegiatan pasangan calon atau partai pengusung sangat rendah. Untuk jenis pemilih ini sangat kurang karena ikatan ideologi mereka sangat rendah sekali.</p> <p>c. Mereka juga kurang mempedulikan janji politik dan kebijakan pasangan calon atau partai pengusung.</p> <p>d. Golongan putih (golput) didominasi oleh jenis pemilih skeptis ini.</p> <p>e. Walaupun ikut serta dalam pemungutan suara biasanya mereka melakukannya secara ikut-ikutan.</p> <p>f. Mereka berkeyakinan siapapun, pasangan calon yang jadi pemimpin, atau siapapun yang menang dalam pemilihan tidak akan membawa daerah ke arah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka.</p>
--	---

5. Pemilih Transaksional

Perilaku transaksional itu memang bukan sesuatu hal yang baru. Perilaku memilih pemilih yang bercorak transaksional itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Gejala tersebut mulai mengemuka pada Pemilu tahun 2004, para pemilih tidak lagi secara suka rela mendukung calon pemimpin. Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau menghadiri berkampanye rapat umum asalkan mendapatkan uang transport, memperoleh kaus, dan imbalan-imbalan material lainnya. Dalam banyak kasus pemilihan kepala daerah, perilaku demikian sudah banyak ditemui. Para calon membagikan uang atau materi yang lain dengan harapan bisa terpilih. Tradisi demikian sudah lama terjadi dan lebih mengemuka

belakangan ini. Tidaklah mengherankan, ada orang yang mencalonkan menjadi kepala daerah sampai menghabiskan miliar rupiah, sedihnya perilaku transaksional ini bahkan ditunjukkan secara terang-terangan.

Di sisi yang lain, banyak calon juga terjebak dalam suasana transaksional seperti itu. Dalam banyak kasus, calon datang ke tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ormas, untuk melakukan transaksi agar mendukungnya. Juga ada tim sukses yang langsung memberikan "sesuatu" kepada calon pemilih, baik berupa barang maupun uang. Alasan pembungkusnya bermacam-macam, seperti sebagai sedekah, zakat, dan alasan lain. Demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dari transaksi, antara yang memilih dan yang dipilih. Tetapi, di dalam demokrasi yang sehat, transaksi itu tidak berwujud material yang diberikan kepada pribadi-pribadi (*private*) yang bersifat instan melainkan kepada masyarakat umum (*public*) yang bersifat jangka panjang.

Tabel 2.2.5

Indikator Pemilih Transaksional

Pemilih Transaksional	Indikator
	a. Ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya sesaat atau instan b. Harapan yang sifatnya praktis dan sesaat c. Mau memberikan dukungan jika mendapatkan imbalan d. Memberikan sesuatu kepada pribadi seseorang (<i>private</i>) e. Tidak lagi sukarela dalam memberikan dukungan.

	f. Adanya bagi bagi barang atau uang dengan suatu tujuan.
--	---

2.2.5.1 Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat (34) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin., kemudian di pasal 199 menerangkan bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang, di jelaskan dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih, Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikotadan wakil walikota, Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin,
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- c. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik,

d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

¹³ Menurut Suhartono (2009), pemilih pemula yang khususnya para remaja memiliki nilai kebudayaan yang bebas, santai dan condong pada hal-hal yang informal, oleh karena itu hal yang tidak menyenangkan biasanya akan dihindari oleh pemilih pemula. Disamping mencari hal baru biasanya kelompok sepermainan adalah sesuatu penting pada kehidupan seorang pemilih pemula, sehingga bagi seorang pemilih pemula perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Pemilih Pemula adalah orang yang terdaftar dalam daftar pemilih dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam ⁷⁶ Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada tahun 2020. Pemilih pemula juga dapat diartikan masyarakat yang menginjak usia 17 tahun atau lebih dan baru menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam pemilihan. Mereka terdaftar tetapi belum tentu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebagai penonton atau mencoblos dengan benar dan rasional atau mencoblos dengan benar tetapi emosional atau salah mencoblos surat suara sehingga suaranya menjadi tidak sah. Butuh ruang tersendiri untuk membahas perilaku memilih para pemilih pemula ini. Dalam beberapa pilkada, pemilih pemula ikut

menentukan terpilihnya kepala daerah di wilayah tertentu. Oleh karena itu, karakteristi perilaku pemilih pemula menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi secara substansial. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya masih cenderung kurang, lebih mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik. Sebagaimana jenis pemilih lainnya, pemilih pemula masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis, namun preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya. Hal ini penting untuk di kaji karena pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang ikut andil dalam menentukan pemimpin di daerah tertentu, Maka dari itu pemilih pemula masih terbuka peluang menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di daerah. Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai karena jika suatu partai mendapatkan pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka akan mendapatkan suara yang unggul dalam pemilu. Pemilih pemula Indonesia menurut NCSS (2003) masih memilih berdasarkan besar namanya suatu partai dan bukan dari visi dan misi partai tersebut. Sehingga disini diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas. Pemilih pemula sebagai pengguna hak pilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, pada umumnya belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kandidat mana yang harus mereka pilih. Pada situasi seperti ini, pemilih pemula selalu menjadi bidikan dan sasaran setiap kandidat untuk

meraih dukungannya.

⁶⁰ Karakteristik Pemilih Pemula, pada dasarnya pemilih pemula mempunyai karakter yang berbeda dengan pemilih-pemilih yang sudah pernah terlibat dalam pemilu/pemilihan sebelumnya, yaitu:

1. Belum pernah memilih atau menjatuhkan pilihan di dalam Tempat Pemungutan Suara;
- ¹⁶ 2. Belum memiliki pengalaman dalam memilih;
3. Memiliki antusias yang tinggi;
4. Kurang rasional dalam memilih;
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih semangat dan bergejolak, dan apabila tidak dikendalikan akan mempunyai efek terhadap konflik-konflik sosial didalam pemilu/pemilihan;
6. Menjadi target peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Karakteristik Pemilih pemula memang berbeda dengan pemilih lainnya oleh karna itu membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan membentuk pemilih pemula yang memiliki kematangan secara psikologis dalam proses pemilihan untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan setiap pilihannya.

Tabel 2.2.5.1

Indikator Pemilih Pemula

Jenis	Indikator
Pemilih Pemula	⁸⁹ 1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah/pernah kawin, yang mempunyai hak pilih, 3. Belum pernah memilih atau menjatuhkan pilihan di dalam Tempat Pemungutan Suara 4. Belum memiliki pengetahuan dalam memilih. 5. Pemilih yang sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu, (<i>Pensiunan anggota TNI dan Polri</i>)
--	--

Perilaku memilih (*Voting Behavior*) Pemilih Pemula menekankan pada faktor-faktor psikologis, pemilih menjelaskan bahwa penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Seseorang dalam hal ini sebagai pemilih pemula mencoblos suatu kandidat ataupun Parpol dipengaruhi oleh perilaku memilih (*voting behavior*), dikarenakan Faktor-faktor psikologis pemilih pemula inilah yang berpengaruh terhadap perilaku politik. Sehingga dengan adanya faktor-faktor Psikologis yang menekankan kepada 3 faktor psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik (identitas partai), orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat, maka dapat dikatakan bahwa dari masing-masing aspek psikologis ini akan dilihat faktor psikologis mana yang lebih dominan yang akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan pemilihan. Inti dari faktor psikologis ini adalah identifikasi faktor ikatan emosional terhadap partai yang kemudian akan mempengaruhi sikap seseorang tersebut terhadap para calon kandidat dan dengan adanya faktor isu-isu politik yang berkembang ataupun faktor kandidat, sehingga ketiga faktor ini menjadi kekuatan dan arah untuk mencapai kemenangan kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku

pemilih.

Bahwa dengan adanya faktor psikologis pemilih yang mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses politik, ketiganya saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. dari ketiga faktor inilah yang nantinya akan dilihat apa saja yang mempengaruhi terhadap perilaku memilih pada pemilih pemula. Pendekatan psikologis atau aliran Michigan, percaya bahwa tingkah laku memilih dari seseorang dapat dideteksi dengan konsep yakni apakah seseorang memilih suatu kandidat berdasarkan pada ikatan emotional terhadap parpol, ataukah pada issue- issue yang berkembang atau terhadap kandidat itu sendiri dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu ataupun kandidatnya.

Faktor psikologis ikatan emotional terhadap partai sangat erat kaitannya dengan partai yang mengusungnya, dimana visi dan misi keberhasilan partai menjadi ukuran seseorang dalam memilih kandidat begitu juga dengan faktor orientasi terhadap isu-isu yang berkembang dan faktor orientasi terhadap kandidat. Faktor-faktor psikologis lebih menitik beratkan pada konsep pendekatan para pemilih yang menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari "sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih". Penganut pendekatan michiganini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang.

Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses

sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu maupun isu yang ada. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak.

Faktor-Faktor Psikologis sangat erat kaitannya dengan perilaku pemilih (*Voting Behavior*) karena didalam hal ini pemilih pemula yang akan menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau tidak disukai, apakah dari faktor ikatan emosional terhadap partai yang didalamnya terdapat reaksi psikologis dan kesamaan dalam ideology dengan dirinya, Apakah karna adanya issue-issue yang berkembang sehingga ini menimbulkan dorongan Dukungan atau tindakan pemilih untuk memilih kandidat tertentu yang memiliki program-program yang relevan dan menawarkan solusi yang tepat atas masalah- masalah yang aktual terjadi pada masyarakat. Ataupun karna faktor kandidat itu sendiri yang menyebabkan orang memilih berdasarkan dukungan atau tindakan pemilih untuk memilih figur calon yang didasarkan atas kemampuan, kepribadian, kepopuleran, kepemimpinan, serta rekam jejak kinerja calon tersebut.

2.2.5.2 Persepsi Pemilih Pemula

Menurut Desiderato dalam Rahmat (2007: 51), Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi adalah memberikan makna respon Panca indra. Yusuf (1991:108) menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Pareek dalam Sobur (2003: 446) memberikan definisi lebih luas terhadap persepsi, yaitu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi

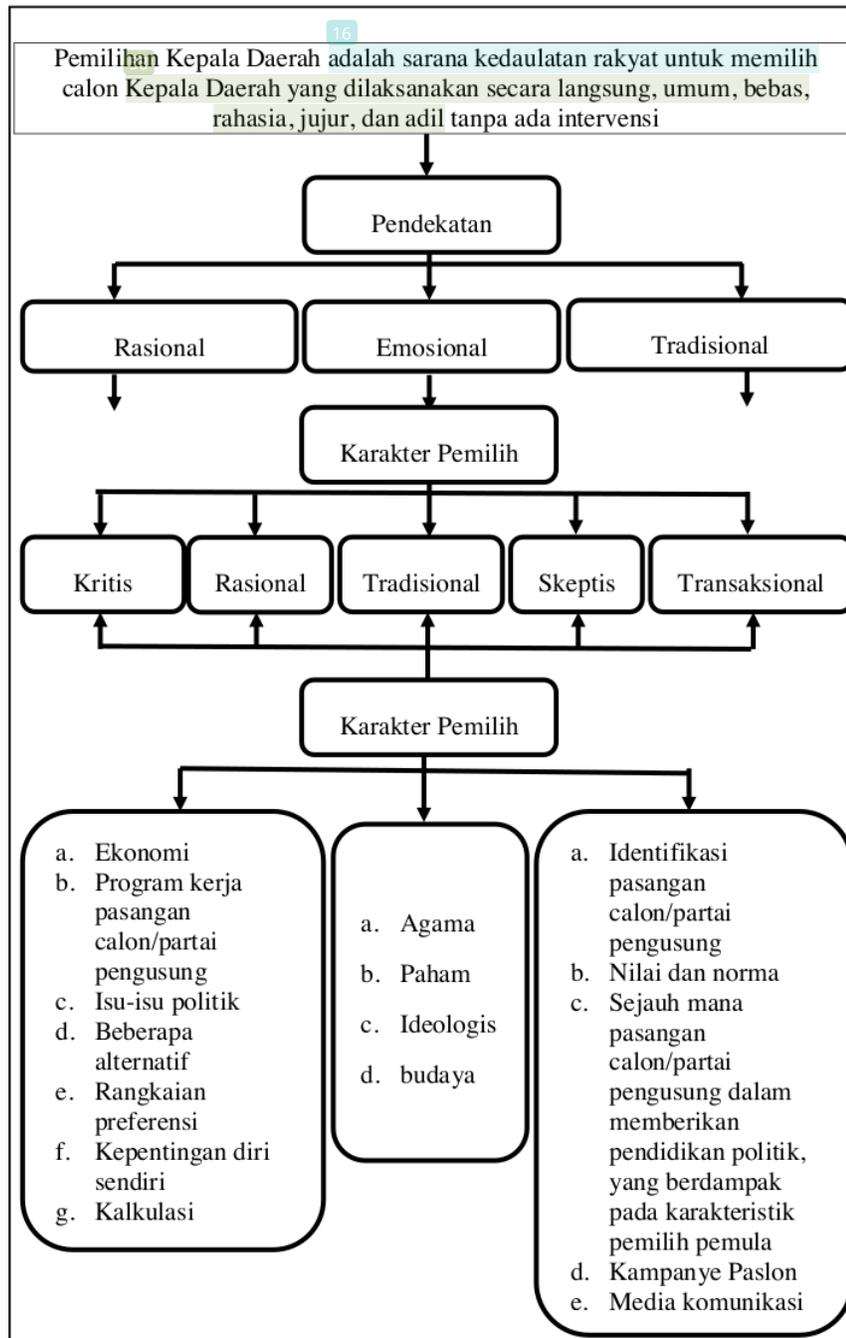
kepada rangsangan panca indra atau data.

Sedangkan Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya respon oleh individu melalui alat panca indra atau juga disebut proses sensoris. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima respon melalui panca indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, semua itu merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima respon dari luar individu.

Dari berbagai pengertian persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara individu dalam memandang, mengartikan, memaknai, menyimpulkan dan memberikan reaksi kepada suatu objek yang diperoleh melalui proses panca indra, pengorganisasian, dan penginterpretasian objek. Masih Menurut Walgito (2010: 102) Proses Terjadinya Persepsi, yaitu terjadinya persepsi diawali dari suatu objek yang menimbulkan respon, kemudian respon tersebut mengenai panca indra. Proses ini dinamakan proses kealaman atau proses fisik. Setelah melewati proses fisik, respon yang diterima indera tersebut diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di otak ini disebut sebagai proses psikologis. Proses

ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif karena dimaksudkan untuk menggali secara mendalam karakteristik pemilih pemula dalam Pilkada Tuban. Dengan mengikuti paradigma interpretif, pemahaman terhadap perilaku subjek penelitian akan dilakukan secara emik-etik. Secara emik, peneliti berupaya memahami apa yang dipahami oleh subjek penelitian.

sedangkan secara etik, pemahaman tersebut akan dibawa pada ranah teori dan metode ilmiah. Sedangkan menurut Riyanto (2001 :3) pendekatan atau pola penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pola pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk membahas gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, menggunakan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Pemilihan penulisan deskriptif kualitatif ini didasarkan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban era pandemi Covid-19. Harapan peneliti dapat menemukan jawaban-jawaban yang ada dalam penelitian, berusaha melihat gambaran menyeluruh atau holistik dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif sebagai data utama penelitian bisa didukung dengan data kuantitatif. Selain data

primer, juga digunakan data skunder. Kedua jenis data ini akan digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih pemula dalam pilkada di Tuban. Data primer adalah data yang didapatkan melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, Data primer yang di peroleh dari sumber pertama adalah pemilih pemula yang ada di Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan memakai beberapa media untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat dokumentasi, alat tulis serta alat perekam.

Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung, berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dokumentasi dilakukan sebagai data penguat penelitian pada karakteristik pemilih pemula pada Pilkada serentak 2020. Sumber data primer yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara dengan para pemilih pemula. Sumber data sekunder diambil dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Selanjutnya bahan dari data tersier yaitu dari petunjuk yang mendukung dan buku-buku.

3.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian pada dasarnya yaitu topik permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Pemilih Pemula yang ada di Kabupaten Tuban. Penelitian ini secara khusus akan membahas

	observasi dan studi dokumentasi)																			
2	Pengumpulan data ke 7 sampai 10 kecamatan, masing-masing kecamatan 5-10 orang	✓	✓	✓	✓	✓														
3	Analisis data					✓	✓	✓												
4	Penyusunan Laporan						✓	✓	✓											
5	Ujian Tesis							✓												
6	Penyusunan artikel							✓	✓											
7	Seminar nasional							✓												
8	Publikasi artikel jurnal nasional								✓											
9	Publikasi artikel jurnal internasional										✓	✓								
10	Penulisan <i>book chapter</i>																	✓	✓	

70 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), baik langsung maupun melalui telepon untuk mendapatkan data primer, data juga akan dikumpulkan dengan observasi dan studi dokumen untuk data sekunder. Pengumpulan data akan dihentikan ketika sampai ditemukan kejenuhan (80 *saturated*). Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi untuk menjelajahi dan melacak sebanyak mungkin realitas fenomena yang tengah di kaji. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 163 observasi wawancara dan dokumen menurut Sugiyono (2014:231).

Berdasarkan kategorinya penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan satu diantara metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui secara hal-hal terkait subjek penelitian untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dan akan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tuban untuk dapat mengetahui data-data pemilih yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Selain itu, untuk mengidentifikasi dan mencari informasi awal terkait pelaksanaan pilkada dimasa pandemi dari perspektif KPU Kabupaten Tuban.

2. Wawancara Mendalam (*Indeep Interview*)

Wawancara mendalam adalah cara pengumpulan data dengan metode mengajukan beberapa pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan lebih terperinci dan mendalam mengenai pengetahuan, perilaku, sikap informan yang terkait dengan tujuan studi. Wawancara mendalam dilaksanakan terhadap informan-informan yang mewakili pemilih pemula di Kabupaten Tuban yang berusia 17-21 tahun atau telah menikah pada saat pemilu digelar dan baru pertama kali mengikuti pemilihan. Informan yang

telah di wawancarai terdiri dari beberapa pemilih pemula dan ketua komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kab. Tuban sebagai informasi pendukung.

3. Dokumentasi/Studi Pustaka

Selain itu juga untuk memperdalam studi peneliti akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dan rekapitulasi perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Tuban 2020. Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian, Penulis menggunakan metode ini karena lebih mudah, dalam arti apabila sumber datanya ada yang keliru, bukan kesalahan mutlak dari penulis.

149

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dinalisis secara kualitatif, mulai dari seleksi data, pemilahan data, interpretasi, dan reduksi, lalu hasilnya akan dideskripsikan secara lengkap dan mendalam (*thick description*) sebagaimana yang disarankan Clifford Geertz.

61

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

61

Menurut Sugiyono (2014:99). Proses analisis data mengandung empat komponen utama yaitu:

1. Pengumpulan Data

Penulis mendapatkan informasi dari persepsi, pertemuan dan informasi dari laporan. Sejak saat itu pencipta memiliki informasi yang diperlukan untuk dipecah.

2. Reduksi Data

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengolahan data, disini penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-data yang sudah terkumpul. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*Display Data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penulis memperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumen mengenai tema penelitian. Disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi semua uraian masalah yang dikaji. Yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan dalam penelitian verifikasi adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini merupakan proses *re-*

check yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan simpulan-simpulan awal. Pada dasarnya penarikan kesimpulan dilakukan pada awal pengumpulan data. Data yang sudah di verifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan kesimpulan.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Geografis Tempat Penelitian

Letak kabupaten Tuban berada paling barat utara pantai provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, letak kabupaten Tuban berada antara 111,30' - 112,35' BT dan 6,40' - 7,18' LS. Dari sisi geografis di utara Kabupaten Tuban berbatasan dengan Laut Jawa, dengan kabupaten Bojonegoro di selatan, dengan kabupaten Lamongan di timur dan dengan kabupaten Rembang di barat. Kabupaten Tuban letaknya berada di pantai utara Jawa 1.839,94 Km² luas daerahnya dengan 65 km panjang pantainya dan 22.608 Km luas lautan. Terdapat lima kecamatan yang berbatasan dengan Laut Jawa di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Jenu, Bancar, Tambakboyo, Tuban dan Palang. Sedangkan lainnya berada di dataran tinggi dan bebatuan. Secara geologis jenis tanah kabupaten Tuban terbagi menjadi tiga yaitu merah, mediteran, kuning meliputi kecamatan-kecamatan yaitu Palang, Semanding, Montong, Jenu, Widang Tambakboyo, Plumpang, Kerek dan Merakurak, untuk jenis tanah aluvial antara lain Tambakboyo, Tuban, Bancar, Rengel, Palang, Soko, Parengan, Senori, Singgahan dan Bangilan. Kemudian jenis tanah grumosol meliputi tiga kecamatan yaitu Jatirogo, Bancar dan Senori.

Kabupaten Tuban Secara administratif, terbagi jadi 20 kecamatan yang terdiri dari 311 desa dan 17 kelurahan. Kecamatan yang mencatat terbanyak jumlah desanya adalah Kecamatan Bancar dengan 24 desa dan 23 desa berada kecamatan Soko. sedangkan paling sedikit desa terdapat di kecamatan Kenduruan yaitu

sebanyak ¹⁹ 9 desa. Sedangkan jumlah kelurahan yang ada di kabupaten Tuban adalah 17 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu : Kecamatan Tuban sebanyak 14 (empat belas) kelurahan, Kecamatan Semanding sebanyak 2 (dua) kelurahan. dan kecamatan Palang sebanyak 1 (satu) kelurahan, kecamatan Montong adalah kecamatan yang terluas dengan ¹⁹ 147,98 km² luas wilayahnya atau sekitar 8,04 % dari semua luas wilayah kabupaten Tuban. Sedangkan yang merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayah ¹⁹ 21,29 km² atau sekitar 1,16 % dari luas daerah kabupaten Tuban.

¹
Gambar 4.1

Peta Kabupaten Tuban



Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban

Berdasarkan cambar peta kabupaten Tuban pada gambar di atas dapat dilihat kabupaten Tuban batas wilayahnya antara lain:

- ¹ laut utara jawa disebelah utara

- kabupaten Rembang provinsi jawa tengah disebelah barat
- kabupaten Lamongan disebelah timur
- kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Blora disebelah selatan

³² Secara topografi tinggi daratan kabupaten Tuban berkisar 5 meter diatas permukaan laut (MDPL) sebelah utara merupakan dataran rendah berada pada ketinggian 0-5 meter DPL, bagian tengah dan selatan juga rendah dataranya dengan ketinggian 5-500 meter DPL, sedangkan ketinggian yang berada di atas ³² 100 meter DPL berada di wilayah kecamatan kenduruan, montong perengan dan grabagan. sedangkan untuk kabupaten tuban luas wilayahnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu luas lautan dan daratan dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Tuban

³² Luas Daratan	1.839 Km ²
Luas Lautan	22.608 Km ²
Panjang Pantai	65 Km ²

Sumber: BPS Kabupaten Tuban 2020

4.2 Demografi Kabupaten Tuban

⁶ Kabupaten Tuban memiliki jumlah penduduk dari hasil registrasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencacatan sipil (*Dispendukcapil*) kabupaten Tuban pada smester satu tahun 2021 yaitu sebanyak 1.234.972 orang. banyaknya penduduk ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2019 yang berjumlah ⁶ 1.168.277. untuk kepadatan penduduk yang ada di kabupaten Tuban pada tahun 2019 mencapai 706 orang/km². banyaknya penduduk di masing-masing

kecamatan cukup beragam, mulai dengan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Kenduruan sebesar 360 jiwa/Km². Sampai kepadatan penduduk yang tertinggi berada di kecamatan Tuban yaitu sebesar 4.320 orang/km² dan

104
Tabel 4.2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kenduruan	30.836
2	Jatirogo	60.140
3	Bangilan	52.668
4	Bancar	61.892
5	Senori	45.759
6	Tambakboyo	44.530
7	Singgahan	45.496
8	Kerek	75.328
9	Parengan	59.913
10	Montong	57.556
11	Soko	90.668
12	Jenu	58.724
13	Merakurak	62.182
14	Rengel	64.106
15	Semanding	120.486
16	Tuban	91.980
17	Plumpang	85.811
18	Palang	93.196
19	Widang	54.676
20	Grabagan	42.332
JUMLAH		1.298.279

Sumber: BPS Kabupaten Tuban Tahun 2020

Penduduk di kabupaten Tuban dari data diatas dapat dilihat bahwa tersebar di 20 kecamatan dengan total penduduk terkecil teradapat di kecamatan Kenduruan dengan 29.251 orang dan penduduk terbesar persebarannya terdapat di kecamatan Semanding dengan 116.071 orang. berikutnya untuk dapat melihat jumlah penduduk secara lebih detail dari kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2.2
 menurut kelompok umur
 dan jenis kelamin penduduk kabupaten Tuban tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-laki	
0-4	42.006	44.537	86.543
5-9	43.069	44.834	87.903
9-14	44.94	47.821	92.761
15-19	44.692	47.483	92.175
20-24	44.802	45.315	90.117
25-29	45.445	44.503	89.948
30-34	48.009	46.367	94.376
35-39	46.17	45.424	91.594
40-44	46.845	45.535	92.38
45-49	45.494	43.354	88.848
50-54	39.563	38.224	77.787
55-59	30.427	31.624	62.051
60-64	20.737	20.743	41.48
65-69	17.703	13.723	31.426
69-74	14.237	9.619	23.856
75 +	19.262	10.283	29.545
Jumlah	593.401	579.389	1.172.790

Sumber: BPS Kabupaten Tuban Tahun 2020

Dari tabel di atas, dijelaskan secara rinci Kabupaten Tuban jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, bisa diketahui bahwa banyaknya penduduk di kabupaten Tuban tertinggi berdasarkan kelompok umur

yaitu 10-14 tahun, yaitu 92.761 orang dengan jumlah penduduk laki-laki. perbandingan. sebesar 47.821 orang dan banyaknya penduduk perempuan sebesar 44.940 orang. jumlah penduduk terendah berdasarkan kelompok umur adalah 69 sampai 74 tahun dengan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 23.856 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.619 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 14.237 orang.

1.3 Pemilih di Kabupaten Tuban

Berdasarkan keputusan dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) komisi pemilihan umum daerah (KPU) kabupaten Tuban pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, banyaknya jumlah pemilih antara perempuan dan laki-laki dapat diketahui pada daftar tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.1

Jumlah Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban

Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		Lk-Pr
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kenduruan	9	11379	11490	22869
2	Jatirogo	18	22140	22446	44586
3	Bangilan	14	18758	19078	37836
4	Bancar	24	22757	23295	46052
5	Senori	12	16761	16645	33406
6	Tambakboyo	18	16374	16476	32850
7	Singgahan	12	16168	16403	32571
8	Kerek	17	26783	28039	54822
9	Parengan	18	21431	22052	43483
10	Montong	13	21714	21473	43187

11	Soko	23	33227	33668	66895
12	Jenu	17	21061	21494	42555
13	Merakurak	19	22677	23682	46359
14	Rengel	16	23238	23591	46829
15	Semanding	17	42109	44479	86588
16	Tuban	17	30926	32988	63914
17	Plumpang	18	30574	30992	61566
18	Palang	19	32315	33097	65412
19	Widang	16	19443	19751	39194
20	Grabagan	11	15702	15843	31545
JUMLAH		328	465537	476982	942519

Sumber: KPUD Kabupaten Tuban

Dapat diketahui untuk kecamatan Kenduruan total pemilih laki-laki (11379) Perempuan (11490), total semua (22869). Kecamatan Jatirogo, total pemilih laki-laki (22140) perempuan (22446), total semua(44586). Kecamatan Bangilan, total pemilih laki-laki (18758) perempuan (19078), total semuanya (37836). Kecamatan Bancar, total pemilih laki-laki (22757) Perempuan (23295, total semuanya (46052). kecamatan Senori, total pemilih laki-laki (16761) perempuan (16645), total semuanya (33406). kecamatan Tambakboyo, total pemilih laki-laki (16374) perempuan (16476), total semuanya (32850). Kecamatan Singgahan, total pemilih laki-laki (16168) perempuan (16403), total semuanya (32571). Kecamatan Kerek, total pemilih laki-laki (26783) perempuan (28039), Total semuanya (54822). Kecamatan Parengan, total pemilih laki-laki (21431) Perempuan (22052), total semuanya (43483). Kecamatan Montong, total pemilih laki-laki (21714) perempuan (21473), total semuanya (43187). Kecamatan Soko, total pemilih laki-laki (33227) perempuan (33668), total semuanya (66895). Kecamatan Jenu, total pemilih laki-laki (21061) perempuan (21494), total semuanya (42555). Kecamatan

Merakurak, total pemilih laki-laki (22677) perempuan (23682), total semuanya (46359). Kecamatan Rengel, total pemilih laki-laki (23238) perempuan (23591), total semuanya (46829). Kecamatan Semanding, total pemilih laki-laki (42109) perempuan (44479), total semuanya (86588). Kecamatan Tuban, total pemilih laki-laki (30926) perempuan (32988), total semuanya (63914). Kecamatan Plumpang, total pemilih laki-laki (30574) Perempuan (30992), Total semuanya (61566). Kecamatan Palang, total pemilih laki-laki (32315) perempuan (33097), total semuanya (65412). Kecamatan Widang, total pemilih laki-laki (19443) perempuan (19751), total semuanya (39194). Kecamatan Grabagan, total pemilih laki-laki (15702) perempuan (15834), sehingga keseluruhan jumlah total data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020 adalah sebanyak pemilih laki-laki (465573) Perempuan (476982), total semuanya (942519).

1.4 Jumlah Perolehan Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serentak tahun 2020 terdapat tiga pasangan calon dan dibawah ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban:

Tabel 4.4.1

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020

No	Kecamatan	Khozanah Hidayati, S.P., M.P-Muhammad Anwar	Aditya Halindra Faridzky, S.E-H. Riyadi, S.H	H. Setiajit, S.H., M.M-Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H. M.H
1	Kenduruan	3208	11283	2924
2	Jatirogo	6565	20267	6128

3	Bangilan	7254	14141	5315
4	Bancar	8795	21234	6695
5	Senori	6732	12795	3629
6	Tambakboyo	6090	14874	4132
7	Singgahan	6132	11986	5716
8	Kerek	9801	27477	3842
9	Parengan	7198	19832	6410
10	Montong	9433	21342	3325
11	Soko	12566	30417	1239
12	Jenu	10754	17162	3599
13	Merakurak	8466	20824	5850
14	Rengel	7736	24931	3815
15	Semanding	12082	39153	11696
16	Tuban	10285	25768	7533
17	Plumpang	11098	26815	7121
18	Palang	13822	29315	5793
19	Widang	7984	17380	3864
20	GRABAGAN	4954	16240	2372
JUMLAH		170.955	423.236	100.998

Sumber: KPUD Kabupaten Tuban

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020. Calon pasangan nomor urut satu Khozanah Hidayati, SP., M.P - Muhammad Anwar mendapatkan suara sebanyak 170.955 (*seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus limapuluh lima*) atau sebanyak 24,2 %. pasangan calon nomor urut dua Aditya Halindra Faridzky, S.E - H. Riyadi, SH mendapatkan suara sebanyak 423,236 (*empat ratus dua puluh tiga ribu duaratus tigapuluh enam*) atau sebanyak 60 %. dan pasangan calon nomor urut tiga H. Setiajit, SH, MM - Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H. mendapatkan suara sebanyak 110,998 (*seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*) atau sebanyak 15,8 %.

1.5 ⁶ Kondisi Sosial dan Budaya di Kabupaten Tuban

a. Kondisi Sosial

Masyarakat di Kabupaten Tuban dalam kondisi ini jika dilihat secara umum mayoritas di Kabupaten Tuban masyarakat beragama Islam. Kondisi budaya dan sosial di Kabupaten Tuban sendiri memiliki perpaduan banyak budaya yaitu budaya budaya Jawa, budaya Tionghoa dan Islam. Tuban juga dikenal dengan kabupaten “BumiWali” karena penyebaran agama Islam dituban merupakan salah satu pusat yang ada dipulau Jawa , disamping itu dengan adanya perpaduan budaya sehingga di kabupaten Tuban juga ada sebuah klenteng terbesar di Asia Tenggara. Selain itu di kabupaten Tuban terdapat berbagai suku, mulai dari suku Jawa, Arab, hingga Tionghoa, keragaman suku bangsa yang ada dituban memberikan corak tersendiri bagi kabupaten Tuban baik dalam segi budaya maupun seni. Bukan hanya itu, kehadiran para pendatang dari luar kabupaten Tuban juga memberikan corak tersendiri bagi situasi budaya dan sosial di kabupaten Tuban.

b. Kondisi Budaya

Kabupaten Tuban mempunyai kebudayaan yang sangat beragam, yaitu sebagai berikut: (Tuban, 2019)

- ⁶ 1. Pentas rakyat sejenis teater tradisional yang dilaksanakan ditanah lapang atau halaman yang sifatnya umum dinamakan sandur.
2. Sunan Bonang menciptakan Lagu tombo ati, dan menjadi shalawatan di daerah Tuban sejak zaman penyebaran agama islam di Tuban oleh Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim.
3. Haul Sunan Bonang yang diperingati atau dilaksanakan setiap malam

jum'at wage bulan Muharram (Sura)

4. serangkain kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang didapat dari hasil pertanian dikenal juga dengan sedekah bumi.
5. Disamping itu juga ada hari ulang tahun Klenteng Kwan Sing Bio (Klenteng terbesar Asia Tenggara) yang juga termasuk agenda rutin kaum tionghoa di Kabupaten Tuban.

1.6 Peta Politik Kabupaten Tuban

Di Kabupaten Tuban peta politik daerah dapat di lihat dari pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan serta hasil dari pelaksanaan pemilu tersebut, kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh 16 Partai Peserta Pemilu terbagi dalam 5 daerah pemilihan dengan alokasi 50 (lima puluh) kursi. Dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 939.765. dari seluruh kursi DPRD di kabupaten Tuban, 16 kursi dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 9 kursi dari Partai Golkar dan 5 kursi dari partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN) 3 Kursi, Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing 1(satu) kursi. Dari seluruh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang ada di kabupaten tuban 43 berjenis kelamin laki-laki dan 7 perempuan. Berikut adalah tabel kursi DPRD kabupaten Tuban periode 2019-2024 setiap partai:

Tabel 4.6.1
Kursi DPRD Kabupaten Tuban Priode 2019-2024

⁶⁴ NO	PARTAI	JUMLAH KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16
2	Partai Golongan Karya	9
3	Pdi Perjuangan	5
4	Partai Demokrat	5
⁹¹ 5	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
6	Partai Amanat Nasional	3
7	Partai Persatuan Pembangunan	2
8	Partai Nasdem	2
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1
¹³³ 10	Partai Bulan Bintang	1
11	Partai Keadilan Sejahtera	1
JUMLAH		50

Sumber: KPUD Kabupaten Tuban

⁵⁸ Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa perolehan kursi anggota DPRD kabupaten Tuban periode 2019-2024 terbanyak dari partai kebangkitan bangsa (PKB) dengan perolehan sebanyak 16 kursi, sedangkan yang paling sedikit adalah ⁵⁹ partai hati nurani rakyat (HANURA), partai bulan bintang (PBB) dan partai keadilan sejahtera (PKS) masing-masing mendapatkan 1 kursi. Dalam pemilihan kepala daerah perolehan kursi di DPRD sangatlah penting karna untuk bisa maju mencalonkan ⁵² sebagai bupati dan wakil bupati harus di usung ¹⁵⁸ minimal 20% dari jumlah total kursi DPRD yang ada di kabupaten, hal ini senaga dengan bunyi ¹¹⁶ undang-undang nomor 10 tahun 2016 ²⁸ pasal 40 yang berbunyi “Partai Politik atau ¹¹⁶ gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi

persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan". oleh karna itu di kabupaten Tuban jumlah kursi DPRD sebanyak 50 maka calon bupati dan wakil bupati bisa maju dalam pemilihan kepala daerah harus mendapatkan rekomendasi sebanyak 10 kursi DPRD.

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pilkada Era Pandemi

Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2020 era pandemi dapat diketahui melalui penggunaan hak konstitusi secara umum, dimana hak pilih dimiliki ²³ setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakannya, sarana kedaulatan rakyat ⁸ untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) ⁶ disebut dengan Pilkada. 2020 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia khususnya kabupaten Tuban karena pada tahun itu masyarakat Indonesia merayakan pesta demokrasi Pilkada serentak ¹¹⁷ di 270 daerah di Indonesia terdiri dari 224 Kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi.

Disaat penyelenggaraan Pilkada sering kita temukan mengapa seseorang pemilih pemula saat yang lain tidak melakukan tindakan politik tertentu sementara iya melakukannya, mengapa pemilih pemula ²² memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tertentu,? Mengapa pilihan seseorang ¹³ pemilih pemula terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan beberapa pertimbangan, sementara ada juga yang melakukan pilihan ikut-ikutan? Mengapa pada kelompok pemilih pemula pilihan politiknya cenderung hampir sama dengan pemilih pemula kelompok lainnya? Ketika kita mengamati pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten tuban dapat diketahui bahwa pemilih pemula di kabupaten Tuban memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu pemilih pemula antara dengan pemilih pemula lainnya, Bagaimana karakteristik pemilih pemula dalam pelaksanaan

Pilkada dimasa pandemi? bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan calon pemimpin daerah tahun 2020 dunia masih dilanda bencana non alam diseluruh dunia yaitu pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Penyebaran virus ini dengan cepat hingga ke seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia. Virus ini menyebar dengan cepat karena penularannya melalui droplets atau air liur manusia dan juga airborne atau penyebaran melalui udara.

Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pengendalian maupun pencegahan penularan Virus tersebut. Langkah awal pemerintah adalah mewajibkan penerapan jaga jarak fisik atau *physical distancing* awalnya *social distancing* dan juga mewajibkan penggunaan masker ketika di luar rumah. Pemerintah kemudian melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan pergerakan masyarakat yang berpotensi terjadi penularan.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang mulanya dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, bahwa pemilihan kepala daerah di tetapkan pada tanggal 23 September tahun 2020, kemudian dengan berbagai pertimbangan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU, DKPP), Komisi II DPR RI dan kementerian dalam negeri dalam hal ini pemerintah yang sepakat untuk menunda pelaksanaannya, pada

tanggal 23 september 2020 pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditunda dan menjadwalkan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan tujuan mencegah resiko penularan yang sangat tinggi. Hingga pada Juni 2020, Kabar tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat karena dianggap pelaksanaannya dapat membahayakan masyarakat banyak dan hanya akan memperburuk jumlah kasus COVID-19.

Menanggapi hal itu, KPU menjamin pelaksanaan protokol kesehatan ketat akan berlaku pada hari pemungutan dan penghitungan suara sebagai bentuk pencegahan penularan virus corona. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban Fatkul Iksan S.H., M.H dalam hal tersebut. Padal pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 di masa pandemi covid-19 beliau menyampaikan dalam wawancara:

Pemilihan serentak tahun 2020 bupati dan wakil bupati Tuban dimasa covid-19 aman untuk dilaksanakan sebab dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan dari awal hingga ahir tahapan pemilihan semua sudah menggunakan protokol kesehatan. (Wawancara dengan ketua KPUD kabupaten Tuban, 3 januari 2022).

Selain melakukan wawancara dengan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Tuban peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pemilih pemula tentang pendapatnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dimasa pandemi, untuk itu pada bagian ini peneliti akan menganalisis untuk mengetahui persepsi pemilih pemula dalam memandang pilkada dimasa pandemi dan memberikan hak politiknya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 era pandemi. Sebagaimana penulis uraikan pada

sebelumnya pembahasan ini bahwa pemilih pemula yaitu pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih pada pilkada sehingga sikap dilematis mereka sangat dalam penentuan pilihan politiknya. Golongan penduduk yang berusia 17 sampai dengan 21 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 adalah Pemilih pemula, Sejalan dengan itu sebagian besar pemilih pemula masih berstatus pelajar atau mahasiswa menjadi incaran sejak lama oleh tim sukses atau kontestan pemilihan serta partai-partai politik pengusung maupun pendukung dalam setiap gelaran pilkada.

Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan kegiatan pengumpulan data dari wawancara untuk mengetahui pandangan pemilih pemula dalam pemilihan tahun 2020 bupati dan wakil bupati Tuban di era pandemi Covid, tentu pandangan ini nantinya akan memunculkan beberapa karakteristik pemilih pemula, beberapa pemilih pemula memandang pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah saat pandemi Covid-19 sebagai berikut, seperti contoh wawancara yang peneliti lakukan pada pemilih pemula yang bernama:

Yusuf Ahmad Miftakurridlo (20) yang merupakan anggota perguruan silat persaudaraan setia hati terate (PSHT), berpendapat bahwa dalam pemilihan tahun 2020 bupati dan wakil bupati Tuban menjadikan masyarakat untuk tidak percaya dengan pandemi COVID-19 karena pemilihan sudah dibolehkan, sehingga masyarakat menganggap pandemi sudah tidak ada. Pada TPS 10 di desa temaji kecamatan jenu, tempat ia melakukan pemungutan suara, masih banyak pemilih yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu juga, tidak tegasnya penegakan prokes oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara. Meskipun begitu, yusuf menganggap Pilkada merupakan hal yang harus dilakukan, namun ditengah pandemi semua wajib serius dalam penegakan protokol kesehatan (wawancara dengan Yusuf Ahmad Miftakurridlo (20) pemilih pemula asal desa Temaji kecamatan Jenu, 4 januari 2022)

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada pemilih pemula yang

lain yang bernama rena melinda dengan pendapatnya sebagai berikut:

Rena Melinda (20) yang merupakan pengajar di taman pendidikan al-Qur'an manbait tholab desa temaji kecamatan jenu. Ia berpendapat bahwa di masa pandemi covid-19 pemilihan kepala daerah sangat beresiko tinggi karena melihat kondisi saat itu jumlah kasus positif yang semakin meningkat tiap hari, namun karna pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu tetap memutuskan melaksanakan pemilihan kepala daerah saya tetap mendukung pelaksanaanya, (wawancara dengan Rena Melinda (20) pemilih pemula asal desa Temaji kecamatan Jenu, 4 januari 2022)

Persepsi pemilih pemula suatu proses penafsiran merupakan untuk menginterpretasikan respon yang dipengaruhi dari berbagai pengetahuan, pengalaman dan keinginan yang relevan. Berdasarkan yang sudah penulis lakukan dan hasil wawancara di atas, pada dasarnya pemilih pemula tidak mempersoalkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, pemilih pemula tetap berbondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tuban tahun 2020.

Penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimana karakteristik pemilih pemula pada tahun 2020 di Kabupaten Tuban saat pilkada era pandemi. karakteristik yang berbeda maupun yang spesifik tetapi melekat pada individu-individu tertentu yang dengan orang lain berbeda, berikut adalah beberapa karakteristik pemilih pemula pada pemilihan serentak bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020:

1. Karakteristik Pemilih Pemula Kritis

Karakteristik yang kritis dari pemilih pemula merupakan individu yang selalu menganalisis pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun partai politik yang mengusungnya, dengan kebijakan yang di janjikan atau akan dilaksanakan.

sehingga pemilih pemula akan selalu memiliki kemauan untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan pasangan bupati dan wakil bupati. Sejalan dengan hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Yuda Dwi Prasetyo dari kecamatan Tuban kota, ketika diwawancarai ia menyatakan:

Saat tahun 2020 pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban kemarin, dalam menentukan sebuah keputusan untuk memilih kandidat, saya dasarkan pada visi- misinya maupun ideologi partai politik pengusung. Disamping itu juga tentang janji-janji saat kampanye untuk memperbaiki daerah kedepan menjadi sebuah pertimbangan untuk menentukan pilihan, Saya tidak akan segan-segan untuk memberikan kritik dan saran kepada tim kampanye jika ada kebijakan yang nanti tidak memihak pada masyarakat. (Hasil wawancara dengan Yuda Dwi Prasetyo 19 th, pemilih pemula asal kecamatan Tuban, Pada 25 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Yuda Dwi Prasetyo pemilih pemula asal kecamatan tuban sangat jelas bahwa dalam menentukan pilihannya ia dengan menganalisis ideologi dari partai pengusung kandidat tersebut dan visi-misi pasangan bupati dan wakil bupati maupun janji janji kampanye menjadi sebuah pertimbangan untuk memilih. Pada pemilih pemula jenis ini, pemilih pemula tidak akan segan-segan untuk memberikan masukan, saran bahkan kritik kepada tim kampanye bupati dan wakil bupati, jika kebijakan yang diambil nantinya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu berdasarkan wawancara dengan Dela Nangingtyas pemilih pemula asal kecamatan jenu hasilnya mengungkapkan:

Sebelum saya memutuskan untuk mencoblos pasangan Bupati dan Wakil Bupati tertentu, yang saya lakukan adalah menganalisa untuk memahami apa-apa yang dianut oleh pasangan tersebut, dan program kerja apa yang ditawarkan, apakah sama dengan nilai ideologi partai pengusungnya atau tidak. Kemudian apabila ada perbedaan yang mendasar dengan ideologi partai pengusung maka saya akan memberikan masukan, saran dan bahkan kritik melalui tim kampanye. Apabila juga tidak di hiraukan atau tidak sesuai ideologinya dengan partai pengusung maka saya tidak akan memilih pasangan itu. (Hasil wawancara

dengan Dela Naningtyas 21 th, pemilih pemula asal kecamatan Tuban, Pada 25 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuda Dwi Prasetyo 19 th dan Dela Naningtyas 21 th tersebut di atas, bahwa dalam menentukan sebuah pilihannya yang bersangkutan dapat kita ketahui dia melakukan analisa terhadap ideologi dari partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati tersebut. Ketika harapan tidak sesuai dengan fakta yang ada maka pemilih pemula jenis ini pilihan politiknya akan beralih pada kandidat yang lain yang di anggap sesuai dengan harapannya. Dengan begitu karakteristik seperti ini adalah gabungan antara kemampuan dan orientasi pasangan calon atau partai politik pengusung. Pemilih pemula tipe ini merupakan gabungan antara kemampuan pasangan dan tingginya orientasi calon bupati dan wakil bupati dan partai pendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat. Ikatan ideologi membuat loyalitas pemilih pemula terhadap pasangan calon dan partai pengusung cukup besar dan tidak seperti pemilih rasional untuk berpaling pasangan yang lain. Pemilih pemula ini ideologi partai politik pengusung dijadikan sebuah pijakan kemana mereka akan berlabuh ke pasangan calon. Setelahnya mereka juga akan memberikan masukan bahkan mengkritisi peraturan yang akan dan sudah dilaksanakan. Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada visi-misi maupun rencana kerja yang dikampanyekan oleh pasangan bupati dan wakil bupati, kemudian mereka mencoba untuk memahami ajaran-ajaran dan ideologi yang menjadi penyeban pembuatan sebuah aturan. Pemilih pemula tipe ini selalu menganalisa kaitan antara nilai dan sistem partai politik pengusung (ideologi) dengan peraturan yang dibuat pasangan bupati dan wakil bupati. Jika ada perbedaan nilai ideologi partai dengan pasangan bupati dan wakil bupati, maka mereka

memberikan masukan dan kritik, atau memilih pasangan bupati dan wakil bupati yang lain.

2. Karakteristik Pemilih Pemula Rasional

Pemilih pemula yang Rasional, pemilih pada level rasional ini tidak mementingkan hal-hal yang bersifat fanatis pada sepasang bupati dan wakil bupati maupun partai politik pengusung, pemilih pemula ini akan cenderung melihat apa yang telah dilakukan oleh pasangan bupati dan wakil bupati atau partai politik pengusung, seperti yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Yuda Dwi Prasetyo yang terlihat pada kutipan wawancara sebagai berikut:

Saya memilih sepasang calon bupati dan wakil bupati tuban tahun 2020 beberapa hal yang ada mendasarinya, yaitu faktor pasangan calon yang ada mempunyai sejarah yang baik, keluarganya memiliki kepemimpinan yang baik dan sudah terbukti, ini dapat dilihat dari kesuksesannya memajukan daerah di periode keluarganya saat menjabat” (Hasil wawancara dengan Yuda Dwi Prasetyo 19 th, pemilih pemula dari kelurahan Sukolilo kecamatan Tuban, Pada 25 Januari 2022)

Pernyataan yuda di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Aulia Eka Novinda Indiany pemilih pemula asal kecamatan Tuban, saat wawancara menyatakan:

Sangat bagus dan masuk akal visi-misi yang ditawarkan. Khususnya dalam pembangunan daerah pedesaan, karna daerah tuban ini mayoritas adalah desa, saya sangat suka dengan program yang di janjikan” (Hasil wawancara dengan Aulia Eka Novinda Indiany 19 th, pemilih pemula asal kelurahan perbon kecamatan tuban, Pada 25 Januari 2022)

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh pemilih pemula yang lain. Berikut adalah petikan jawaban yang disampaikan oleh Nuke Okta Yolandita dari kecamatan Tuban, menyatakan:

Pemimpin yang baik menurut saya adalah semasa menjabat dia yang berbagai bidang perubahan sudah dilakukannya dengan banyak, seperti ada perbaikan jalanan dan lain-lain” (Hasil wawancara dengan Nuke Okta Yolandita 18 tahun, pemilih pemula asal kelurahan Latsari, kecamatan Tuban, Pada 25 Januari 2022)

Ketika wawancara di atas yang diungkapkan oleh Yuda Dwi Prasetyo, Aulia Eka Novinda Indiany, Dan Nuke Okta Yolandita, secara mandiri mereka meletakkan pilihannya dengan didasarkan hal yang rasional. Disinilah kita dapat mengetahui adanya pandangan yang rasional pada pemilih pemula. Pendekatan rasional paling utama berkaitan dengan orientasi pemilih, yaitu orientasi topik dan orientasi pada seorang pasangan calon, pertanyaan lebih lanjut kami berikan kepada pemilih pemula mengenai apakah saat pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban pada tahun 2020 mereka pernah memperoleh barang-barang atau imbalan berupa uang dari tim sukses maupun calon. Pertanyaan sering muncul kaitanya pada pilihan rasional yang menjabarkan bahwa teori pada pilihan rasional melihat proses memilih sebagai hasil hitungan untung dan rugi, yang menjadi pertimbangan bukan hanya “biyaya” memilih dan bisa jadi suaranya dapat memengaruhi hasil yang diinginkan, tetapi ini dibuat oleh pemilih pemula serta pasangan calon bupati dan wakil bupati kalau hendak mencalonkan diri untuk memenangkan kontestasi pemilihan.

Keuntungan apapun tidak diperoleh pemilih pemula dalam memberikan sebuah kemenangan pada pasangan yang telah terpilih. Tidak banyak diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional meskipun dengan mengungkapkan kesuksesan dan visi misi yang dikampanyekan oleh pasangan calon tertentu. Jadi ada kegiatan politik sosialisasi di lingkungannya. Pemilih pemula dalam memilih juga tidak hanya memandang uang atau barang sebagai

alasan saat memilih. Penelitian yang dilakukan membuahkan hasil, ada satu bentuk pandangan yang condong diperlihatkan oleh pemilih pemula yaitu tingginya ketertarikan politik dari lingkungan keluarga. Preferensi ini dilandasi banyak pemilih pemula yang diwawancarai melakukan hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara pada pemilih pemula yang bernama Dwi Wahyuni dari kecamatan tambakboyo yang menyatakan:

saya dan keluarga memilih salah satu pasangan calon. Bapak, ibu, dan saudara saya memilih sama-sama pasangan calon tersebut” (wawancara bersama dengan Dwi Wahyuni dari desa glondonggede kecamatan tambakboyo, 19 tahun, Pada 25 januari 2022)

Diatas adalah pernyataan menunjukkan adanya kemiripan pilihan yang ada didalam kalangan keluarga. Hal ini senada pada uraian dalam pendekatan sosiologis guna menjabarka perilaku pemilu pemula, yang menurut logis terbagi pada model penjelasan mikrososiologis serta gaya penjabaran makrososiologis. Model dasar penjabaran mikrososiologis bermula dari teori kalangan sosial yang dicampurkan. Menurut kajian ini, setiap individu terikat dalam beberapa kalangan sosial, contoh keluarga, lingkaran teman sepermainan, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan sebagainya (Efriza, 2012: 45).

3. Karakteristik Pemilih Pemula Tradisional

Karakter pada pemilih pemula tradisional ini, pemilih pemula mempunyai tujuan ideologi yang besar dalam menentukan sebuah kebijakan politik, tidak hanya aspek rasional maupun kritis yang menjadi pertimbangan. Namun, figur pasangan bupati dan wakil bupati yang dianggap mempunyai daya tarik dan sosok harapan bagi masyarakat dapat mengubah pandangan psikologis pemilih pemula. Mengingat kecondongan pemilih pemula memberikan pilihannya dikarenakan

adanya konteks ketokohan yang muncul dominan. Senada dengan yang di ungkapkan seorang pemilih pemula asal kecamatan jatirogo yang bernama Popi Nike Trisnawati ketika diwawancarai:

Tahun 2020 Pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban kemarin wajib dilaksanakan walaupun dalam kondisi covid-19, oleh sebab itu sebagai pemilih saya harus datang memilih. Apalagi ada salah satu pasangan calon yang menjadi “idola” saya dalam pemilihan tahun 2020 kemarin”. (Hasil wawancara dengan Popi Nike Trisnawati, 19 th, pemilih pemula asal desa sadang kecamatan jatirogo, pada tanggal 17 januari, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Popi Nike Trisnawati, bahwa pertimbangan ia memilih pasangan bupati dan wakil bupati tuban 2020 karena adanya unsur fanatisme kepada kandidat. Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara yang diutarakan oleh salah satu pemilih pemula asal kecamatan kenduruan yang bernama Jama Al Ferry Ababil Mutahal, dia menyatakan:

Saya mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah ada rekam jejak mampu memimpin, disamping itu, Saya sudah mengetahui pasangan calon tersebut daripada dengan calon lain, karna menurut saya kapasitas kepemimpinan yang baik dia miliki” (wawancara dengan Jama Al Ferry Ababil Mutahal, 19 th, pemilih pemula asal desa jlodro kecamatan kenduruan, pada 17 januari, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Jama Al Ferry Ababil Mutahal di atas tersebut, bahwa sepasang bupati dan wakil bupati yang dipilih adalah sepasang yang memiliki kedekatan atau sudah di kenal oleh pemilih. Kemudian pasangan bupati dan wakil bupati yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan kampanye sehingga di kenal di kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula tradisional ini merupakan tipe pemilih pemula yang bisa dimobilisasi oleh pasangan bupati dan wakil bupati selama masa kampanya, fanatisme yang besar menjadi salah satu corak dari pemilih tradisional yang sangat tampak. Pemilih tipe

ini mempunyai orientasi ideologi yang cukup tinggi. Pernyataan pemilih pemula di atas jelas sangat menunjukkan adanya identifikasi kepada pasangan bupati dan wakil bupati, dimana telah dijabarkan sebelumnya terkait identifikasi terhadap pasangan bupati dan wakil bupati karena faktor masa lalu atau sejarah. Hal ini kemudian yang mempengaruhi anggapan pemilih pemula tipe tradisional pada pasangan calon.

¹⁶ Menurut penulis penilaian pemilih pemula yang ada di Tuban terhadap ⁹ pasangan bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2020, untuk memilih kandidat dipengaruhi kekuatan nilai dan norma yang meluas pada dirinya sendiri sebagai bentuk sosialisasi dari yang mereka terima dari kandidat. Pememilihan seseorang pada seorang kandidat bisa muncul atas pertimbangan yang sama pada agama dan suku, hal itu namun disebabkan oleh pandangan dan sikap, bisa yang muncul dari faktor nilai dan norma pemilih pemula maupun dari partai politik yang mengukung pasangan calon.

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa persepsi yang ada muncul dari faktor nilai dan norma untuk pemilih pemula. Dimana pemilih pemula melabuhkan pilihanya di pengaruhi oleh figur bupati dan wakil bupati yang mereka idolakan. Identifikasi terhadap pasangan bupati dan wakil bupati atau keluarga bisa terpengaruh oleh ¹² pengalaman masa lalu dan sejarah dalam kehidupan bernegara serta berkelompok. Beberapa tolokukur yang dapat digunakan oleh individu pemilih pemula guna memberikan penilaian pada calon bupati dan wakil bupati, ⁹ khususnya bagi calon bupati yang muncul dari incumben dan hendak mencalonkan ²¹ kembali, di antaranya kompetensi, kualitas, dan integritas calon menjadi indikator (Efriza (2012:45).

4. Karakteristik Pemilih Pemula Skeptis

Pada karakteristik pemilih pemula yang Skeptis, dimana ikatan pemilih pemula terhadap pasangan bupati dan wakil bupati atau parpol pengusung sangatlah rendah, maka dengan demikian selera politik pemilih pemula jenis ini bisa kurang, hal itu di tunjukan pada sikap yang apatis dari pemilih pemula, bahkan kurang memperdulikan adsar partai politik pengusung maupun kebijakan dan program kerja dari pasangan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Mochamad Saiful Fahmi, ia mengungkapkan:

Tahun 2020 Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban lalu saya tidak terlalu mempedulikan pasangan itu mempunyai ideologi atau tidak dan punya program kerja yang baik atau tidak, karena bagi saya sama saja siapapun yang menjadi bupati. Kalaupun sudah terpilih belum tentu ia mampu menyelesaikan persoalan yang ada di kabupaten Tuban, pada pilkada kemarin saya menggunakan hak pilih saya karna ikut-ikutan saja, dan saya kurang percaya dengan adanya covid-19. (hasil wawancara dengan Mochamad Saiful Fahmi, 19 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa temaji, kecamatan jenu, 10 januari 2022).

Wawancara dengan Mochamad Saiful Fahmi berdasarkan hasil di atas bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan bukan terlalu memperdulikan ideologi yang di anut pasangan bupati dan wakil bupati atau parpol pengusung, selain itu ia juga tiak meperdulikan program kerja dan kebijakan yang di buat, mau seperti apa kebijakan dan program kerjanya tidak ia perdulikan. Pemilh pemula tipe ini tidak mempunyai ideology yang tinggi dan orientasi pada pasangan bupati dan wakil bupati maupun partai pengusung, dan tidak menjadikan kebijakan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai sesuatu yang penting. Pada pemilih jenis skiptis ini Keinginan berpartisipasi atau terlibat dengan pilkada sangat kurang, sebagaimana hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Sinta Leviona dari basis

pemilih marginal, ia mengatakan sebagai berikut:

Saya tidak ingin bersama ikut serta pada pemilihan bupati dan wakil bupati, biarkan saja yang berminat, untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Ya saya gak begitu suka dengan politik, saat pilkada kalau pas berkeinginan datang ya saya datang ke TPS, kalau tidak berkeinginan datang ya saya tidak datang ke TPS untuk memilih, gitu aja kok, gak penting. Apalagi saat covid seperti ini. (hasil wawancara dengan Sinta Leviona, 19 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa Purworejo, kecamatan Jenu, 10 januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mochamad Saiful Fahmi dan Sinta Leviona dapat kita ketahui bahwa Keinginan keinginan pemilih pemula untuk berpartisipasi atau terlibat dengan Pilkada sangat rendah, untuk pemilih tipe ini sangat minim karena kaitan ideologi dia sangat rendah, dia juga tidak memperhatikan kegiatan pemilihan serta kebijakan pasangan bupati dan wakil bupati tidak di pedulikan sehingga implikasinya pemilih jenis ini mendominasi golongan putih (golput). Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Nurul Lailatul Jannah ia mengatakan:

Dalam pelaksanaan Pilkada kemarin saya tidak mencoblos (memilih), karna saya sedang lembur kerja untuk cari uang, dari pada saya nyoblos tapi setelah itu tidak ada perubahan yang baik, baik pembangunan, pengentasan kemiskinan. Kan percuma lebih baik lembur kerja, lumayan dapat tambahan uang. (hasil wawancara dengan Nurul Lailatul Jannah, 20 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa Temaji, kecamatan jenu, 10 Januari 2022).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Nurul Lailatul Jannah, dapat di ketahui bahwa pemilih pemula ini sangat rendah sekali keinginannya untuk berpartisipasi didalam pilkada tuban serentak 2020, tidak adanya semangat dalam menggunakan hak pilinya. Pada *golput* (golongan putih) dipadati oleh tipe pemilih seperti ini, jikalau mereka ikut berpartisipasi saat pemungutan suara bisajadi mereka melakukannya dengan ikut-ikutan. Tipe ini beranggapan siapapun yang

menang dan menjadi pasangan bupati dan wakil bupati tidak mungkin menjadikan daerah untuk yang lebih bagus atau perbaikan menurut tipe ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Zakiyatul Munawaroh selaku Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Tuban, beliau mengungkapkan:

Tahun 2020 Pada Pilkada serentak Tuban masih ada 24% pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya, atau sebanyak 236.700 pemilih yang tidak hadir, ketidakhadiran pemilih ini tentunya juga ada yang dari kelompok pemilih pemula, mungkin adanya keinginan untuk datang ke TPS masih kurang, sehingga perlu diminimalisir pada pilkada yang akan datang. Pendidikan pemilih perlu di tingkatkan kepada semua segmenatasi, khususnya pemilih pemula. harus ada cara-cara yang dilakukan terhadap semua basis pemilih dan perlu dimaksimalkan dalam proses sosialisasinya. Mereka harus dididik, karna pilkada merupakan momen untuk pemenuhan hak pemilih. Wawancara dengan Zakiyatul Munawaroh Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPUD Kabupaten Tuban, 3 januari 2022).

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, bahwa pada pilkada serentak tahun 2020 angka ketidakhadiran semua pemilih sejumlah 236.700 atau 24%, salah satu faktor yang menjadikan orientasi pemilih skiptis sangat lemah dikarenakan mereka kurang tertarik dengan Pilkada serentak 2020 karna dilaksanakan di saat pandemi. Selain itu perlunya adanya peningkatan pendidikan pemilih, pendidikan pemilih merupakan hal yang sangat penting dimana pilkada merupakan momen untuk pemenuhan hak sebagai warga Negara yang baik dan taat aturan.

5. Karakteristik Pemilih Pemula Transaksional

Karakteristik pemilih pemula yang bercorak transaksional ini sungguh sangat mengawatirkan bagi keberlangsungan sistem demokrasi, pemilih pemula yang menentukan pilihan atau berubah-ubah pilihannya karena materi sesaat ini masuk kedalam golongan pemilih pemula yang transaksional. Sedihnya perilaku seperti ini ditunjukkan secara terang-terangan oleh sebagian pemilih, misalnya

ditemukan di berbagai berita di media yang memuat berita bahwa penduduk di lingkungan tersebut mau dating ke TPS jika ada transpor uang dalam jumlah tertentu, siap menerima serangan fajar dan lain sebagainya, berawal dari sini kandidat kepala daerah juga terjebak dalam praktik praktik yang sifatnya transaksional, Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh masyarakat di datangi calon pemimpin, bahkan datang ke pimpinan organisasi guna melakukan kesepakatan supaya memilihnya. Juga banyak tim sukses secara langsung menjanjikan barang⁴⁷ kepada calon pemilih, baik berupa barang maupun uang. Pembungkusnya bermacam-macam alasan, seperti sebagai zakat, sedekah, dan alasan lain sebagainya. Sebagaimana petikan wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Rita Asmawati dari kecamatan palang yang menyatakan:

Pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 kemarin muncul tim kampanye dari satu pasangan calon bupati yang datang kepada saya, dan mengarahkan saya untuk memilih pasangan bupati yang di inginkan, tapi saya tidak mau memilih sesuai yang disarankan kalau saya tidak dapat imbalan apa-apa, saya mau memilih kalau ada imbalanya untuk saya, toh kalau jadi bupati nantinya juga lupa dengan rakyat kecil. Buat apa memilih kalau tidak ada imbalanya. (hasil wawancara dengan Rita Asmawati, 20 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa cempokorejo, kecamatan Palang, 10 Januari 2022).

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan pemilih pemula asal kecamatan palang tersebut dapat kita ketahui bahwa perilaku yang sifatnya transaksional hari ini masih ada bahkan semakin hari semakin meningkat, hal yang bersifat transaksi⁴⁷ memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara demokrasi antara yang dipilih dan yang memilih, tapi pada sebuah tatanan negara yang baik perilaku-perilaku yang bersifat transaksional ini amat sangat disayangkan, karna nantinya ada konsekwensi yang akan terjadi dengan adanya transaksional ini,

pasangan yang menang tidak menganggap harus memiliki pertanggungjawaban kepada pemilih karena telah berkorban sesuatu kepada pemilih dan citradiri jual beli seperti ini condong hanya memberi tempat kepada individu-individu yang mempunyai harta super banyak saja yang berpeluang menjadi pejabat yang nantinya sifat kekuasaan cenderung oligarki.

45 5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pilkada Era Pandemi

Berdasarkan pembahasan yang sudah banyak di tulis di atas terkait dengan karakteristik pemilih pemula saat pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 di kabupaten Tuban, maka bisa di ketahui orientasi pemilih pemula didasarkan dengan masing-masing karakteristiknya. Selanjutnya, disini penulis akan mengemukakan terkait dengan macam-macam pengaruh yang membuat faktor karakteristik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Adapun pengaruh yang merupakan faktor timbulnya karakteristik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Faktor Budaya dan Sosial

Faktor budaya dan sosial adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik pemilih pemula di kabupaten Tuban. kondisi sosial dan budaya pemilih pemula seperti lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi karakteristik pemilih pemula dalam penagmbilan sebuah keputusan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Faktor dimana lingkungan pemilih pemula tinggal serta berinteraksi dengan masyarakat sangatlah penting, Apa yang terjadi dilingkungan pemilih pemula baik eksternal maupun internal keluarga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak setiap individu. misalnya pemilih dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ideologi Islam, maka terdapat kecenderungan individu pemilih tersebut untuk menggunakan azas-azas Islam tersebut, karena mereka sudah terbiasa pada prinsip-prinsip dalam islam di kehidupan sehari-hari. Mayoritas pemilih pemula yang ada dikabupaten Tuban menganut Islam dan berorganisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Maka tradisi-tradisi NU sangatlah mempengaruhi tatanan dalam kehidupan, budaya dan sosial penduduk di kabupaten Tuban.

Setiap pemilih memiliki kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Mayoritas pemilih yang latar belakang organisasinya Nahdlatul Ulama' (NU), maka kyai-kyai yang ada di lingkungannya sangat memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Dengan faktor ini kemudian Pemilih pemula memandang ideologi sebagai landasan dalam membuat keputusan serta bertindak, Kyai atau ulama sebagai orang yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya dalam bentuk pengajaran budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Tuban terkhusus di daerah-daerah pesantren. Ini diwariskan secara runtut, pada keturunan pertama ke berikutnya yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara Istighosah, yasinan, dzibaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan ciri khas dari kelompok ini yang membedakan dengan kelompok

lainnya.

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh sampel informan, dari mereka salah satu, yaitu pemilih pemula yang bernama Mochamad Saiful Fahmi menyatakan:

93 Tahun 2020 Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban lalu saya menjatuhkan pilihan dan memberikan suara kepada salah satu pasangan calon karena lingkungan sekitar mayoritas mendukungnya dan kandidat tersebut kebetulan se organisasi dengan saya disamping itu orang tua juga mengarahkan saya untuk memilihnya.. (hasil wawancara dengan Mochamad Saiful Fahmi, 19 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa Temaji, kecamatan Jenu, 10 januari 2022).

Senada dengan statmen yang diutarakan dari seorang pemilih pemula yang bernama Sinta Leviona sebagaimana diutarakan berikut:

22 Semua keluarga saya memilih calon bupati dan wakil bupati nomor urut itu, karna di lingkungan tempat tinggalku mayoritas mendukungnya, apalagi tokoh masyarakat disini juga mendukungnya. Makanya saya ikut memilih nomor urut itu juga. Terkait dengan adanya covid-19 saya percaya tapi tidak membuat saya takut untuk datang ke TPS, (hasil wawancara dengan Sinta Leviona, 19 th. Salah satu pemilih pemula yang ada di desa purworejo, kecamatan jenu, 10 januari 2022).

Berdasarkan pernyataan dari informan yang di kemukakan diatas oleh Mochamad Saiful Fahmi dan Sinta Leviona menggambarkan bahwa karakteristik pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor sosial di lingkunganya dan budaya ikut dengan tokoh masyarakat masih kental. Karakteristik pemilih pemula seperti demikian ini dikarenakan mereka tidak sanggup untuk melihat bagaimana citra seorang pemimpin yang pas dalam pandangan mereka. Disamping itu, pilihan politik mereka masih kurang utuh menjadikan pilihan politik mereka rentan terjadi gesekan dari kalangan dan penggolongn masyarakat yang terbentuk dimana mereka

tinggal.

2. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Pemilih pemula yang tidak berasal dari golongan keluarga mapan dalam hal ekonomi dan tidak dari keluarga yang memiliki strata pendidikan luas akan condong menggunakan sisi irasional saat pengambilan sebuah keputusan. Faktor isu, rumor, emosional dan anggapan dari masyarakat banyak menjadi hal yang urgent saat sebuah proses keputusan diambil. Masing-masing individu punya kelebihan yang berbeda yang lainnya dengan yang satu, dan ini akan sangat mempengaruhi dalam proses menentukan pilihan pasangan bupati dan wakil bupati. Tingkat ekonomi dan pendidikan dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam membuat sebuah keputusan untuk memilih salah satu pasangan. Seperti yang disampaikan oleh Aulia Eka Novinda Indiany pemilih pemula asal kecamatan tuban, saat melakukan wawancara menyatakan:

Pasangan bupati dan wakil bupati itu sangat bagus dan masuk akal visi-misi yang ditawarkan menurut saya. Dan dengan program yang di janjikan saya sangat suka, tapi karna kebutuhan saya sehari harus ada pemasukan maka ketika ada tim dari pasangan lain memberikan saya imbalan untuk memilih ya saya memilih pasangan yang memberikan imbalan” (Hasil wawancara dengan Aulia Eka Novinda Indiany 20 th, pemilih pemula asal kelurahan perbon kecamatan tuban, Pada 25 Januari 2022)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh pemilih pemula yang lain, berikut adalah petikan jawaban yang disampaikan oleh Nuke Okta Yolanda dari kecamatan Tuban, menyatakan:

Menurut saya pemimpin yang baik adalah yang punya visi-misi dan pergram kerja yang jelas dalam kemajuan daerah, tapi karna saat pemilihan kemarin ada yang memberikan imbalan ya saya pilih yang memberikan imbalan tanpa harus mempertimbangkan visi-misi, ya mau gimana lagi saya juga butuh untuk kebutuhan sehari-hari” (Hasil wawancara dengan Nuke Okta Yolanda 18 tahun, pemilih pemula asal kelurahan Latsari, kecamatan Tuban,

Pada 25 Januari 2022)

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas yang di kemukakan oleh Aulia Eka Novinda Indiany dan Nuke Okta Yolandita menunjukkan bahwa karakteristik pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarganya. Karakteristik pemilih pemula seperti demikian ini disebabkan karena mereka tidak mampu untuk mandiri dengan ekonominya sehingga suaranya mudah berubah sesuai dengan kebutuhan. penyebab ¹² pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan atau orang yang mempengaruhinya dengan imbalan karna keputusan politik mereka masih belum utuh. Sementara itu pemilih pemula yang berasal dari keluarga yang memiliki strata pendidikan luas akan condong sangat selektif dalam proses pelaksanaan sebuah keputusan. Sebagaimana petikan wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Dwi Wahyuni dari kecamatan tambakboyo yang menyatakan:

⁷¹ Pengaruh dari banyak orang supaya saya untuk memilih salah satu pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan tahun 2020 kemarin, tapi saya juga tidak terpengaruh, karna saya melihat janji kampanye dan program kerja yang di tawarkan. Percuma punya bupati kalua gak bisa kerja apalagi tidak memperhatikan dunia pendidikan” (Hasil wawancara dengan Dwi Wahyuni dari desa glondonggede kecamatan tambakboyo, 20 tahun, Pada 25 januari 2022)

Statmen di atas memperlihatkan bahwa pemilih pemula yang berpendidikan tidak mudah untuk dipengaruhi dalam memilih pasangan bupati dan wakil bupati, pendidikan yang tinggi mampu membentuk karakteristik pemilih pemula sehingga dalam sebuah pilihan dilandaskan pada hal hal yang bersifat positif tidak kemudian serta merta menerima pengaruh dari luar tapi pemilih pemula jenis ini dapat memfilter apakah pengaruh yang datang baik atau tidak untuk kemajuan daerah.

3. Faktor Media

Media yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemilih pemula, kemampuan media baik massa maupun sosial sangat cepat dalam mendistribusikan informasi merupakan kekuatan yang bisa membentuk opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih pemula dalam menganalisa informasi, pemilih pemula yang hidup di kota lebih terbiasa dengan informasi-informasi yang majemuk dan pertentangan opini jika dibandingkan pada pemilih pemula yang tinggal di desa. Menurut mereka informasi dari orang tua juga menjadi pertimbangan untuk mereka, serta banyaknya informasi yang muncul dari media lain yang dilihatnya. Hal ini disampaikan oleh seorang pemilih pemula yang bernama Moh. Baiturrahman mengutarakan pernyataannya sebagai berikut:

Saya mengetahui tentang bupati dan wakil bupati tuban ya dari baliho-baliho yang terpasang di pinggir jalan, media sosial dan informasi dari orang-orang dekat, informasi yang masuk itupun tidak saya ketahui secara mendalam sehingga saya tidak melihat secara keseluruhan latar belakang kandidat untuk saya pilih, media memberitakan itu ya saya taunya itu saja. (wawancara dengan Moh. Baiturrahman, 20 th. Salah satu pemilih pemula berasal dari desa Temaji, kecamatan Jenu, 10 januari 2022)

Dari statmen di itu dapat disimpulkan jika pemilih pemula kurang tersentuh atau kurang memperoleh sosialisasi politik kaitanya memilih pimpinan yang pas pada mereka. Disamping itu karakter yang mengalir demikian juga disebabkan karena minimnya karakter pemilih pemula dalam menentukan pilihan mereka. Maka seberapa besar opini publik akan terbentuk didasarkan oleh seberapa banyak informasi-informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

Ketika media massa maupun sosial memberitakan terhadap pasangan calon

bupati dan wakil bupati bersifat positif, maka masyarakat cenderung menilai pasangan calon tersebut positif. Dan juga sebaliknya, apabila media massa atau sosial memberitakan keburukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka masyarakat cenderung menilai pasangan calon tersebut negatif. Hubungan media massa atau sosial dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak selalu objektif, bahkan terkadang cenderung berpihak dalam memberikan informasi terkait pasangan calon tertentu karena memang sang wartawan menjadi kader atau simpatisan partai politik pengusung dan pendukung pasangan calon tertentu.

4. Faktor Figur Pasangan Calon

Citra Kandidat atau pasangan bupati dan wakil bupati adalah sifat-sifat khusus yang melekat pada seorang kandidat atau pasangan calon tersebut dan yang bisa membedakannya dengan kandidat yang lain. Perilaku, tutur kata, kharisma, kemampuan intelektual, maupun kemampuan beradaptasi dengan komunitas di mana ia berada menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan memilih seorang pemilih pemula, tapi Seringkali juga pemilih pemula mencampuradukan kualitas kontestan dengan partai politik yang mengusung atau mendukungnya.

Aktivitas dan kegiatan-kegiatan para kandidat paslon Bupati dan Wakil Bupati serta politikus partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan bupati dan wakil bupati sangat mudah dinilai oleh masyarakat, program kerja, kepedulian terhadap masyarakat, sikap yang ditunjukkannya sebagai tolok ukur calon pemimpin yang idial. Disinilah peran penting seorang pemimpin daerah, Seorang pemimpin dapat membuka gambaran dan *Klue* singkat tentang kapabilitas kepemimpinannya. Hal demikian cukup urgent pada pemilih pemula ketika calon

pemilih dilihatkan pada kegalauan pilihan yang harus dipilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan seorang pemilih pemula asal kecamatan jatirogo yang bernama Popi Nike Trisnawati ketika diwawancarai menyampaikan:

Tahun 2020 pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban kemarin wajib terlaksana walaupun dalam kondisi covid-19, karena sebagai pemilih saya harus ikut memilih. Apalagi ada calon figur pasangan bupati dan wakil bupati yang menjadi “jagoan” saya dalam pemilihan tahun 2020 kemarin”. (Hasil wawancara dengan Popi Nike Trisnawati, 19 th, pemilih pemula asal desa sadang kecamatan jatirogo, pada tanggal 17 januari, 2022)

Hasil statmen di atas menggambarkan bahwa munculnya karakteristik yang ada dari faktor psikologis di pemilih pemula. Dimana pemilih pemula memberikan pilihanya di pengaruhi oleh figur pasangan bupati dan wakil bupati yang dia dambakan. Walaupun sedikit dari mereka yang memperlihatkan karakteristik tipe ini. Penulis berpendapat, munculnya persepsi psikologis yang memunculkan karakteristik ini karna adanya kedekatan pemilih pemula dengan figur pasangan bupati dan wakil bupati yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Pada kajian ini, munculnya pemilih yang mendambakan pasangan bupati adalah hasil evaluasi dari pasangan atau keluarga tersebut. Evaluasi terhadap pasangan bupati atau keluarga banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan sejarah masa lalu dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa tolok ukur yang biasa digunakan oleh para pemilih pemula untuk memberikan penilaian seseorang pasangan bupati dan wakil bupati, khususnya bagi pasangan bupati yang muncul dari incumben dan ingin maju kembali, di antaranya kompetensi, kualitas, dan integritas calon menjadi indikator (Efriza (2012:45)).

Sebagaimana salah satu pemilih pemula asal kecamatan kenduruan yang bernama Jama Al Ferry Ababil Mutahal memberikan penilaian, dia menyatakan:

Saya lebih memilih pasangan pasangan bupati dan wakil bupati yang saya anggap mampu memimpin daerah dan sudah terbukti, disamping itu, Saya sudah mengenal pasangan bupati tersebut di bandingkan dengan pasangan yang lain, karna menurut saya kapasitas kepemimpinan yang baik dalam memimpin dia memiliki” (wawancara dengan Jama Al Ferry Ababil Mutahal, 19 th, pemilih pemula asal desa Jlodro kecamatan Kenduruan, pada 17 januari, 2022)

Pernyataan pemilih pemula di atas jelas sangat memberikan gambaran adanya evaluasi pada figur pasangan bupati dan wakil bupati. Dimana telah dibahas sebelumnya bahwa evaluasi terhadap figure pasangan bupati dan wakil bupati karena faktor masa lalu atau sejarah. Hal itu yang kemudian menjadi pengaruh penilaian pemilih pemula pada pasangan bupati dan wakil bupati dalam menentukan pilihan.

Statmen di tersebut atas juga memperlihatkan adanya irisan emosional dari pemilih pemula pada figur pasangan bupati dan wakil bupati. Menurut penulis penilaian pemilih pemula di kabupaten Tuban pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 era pandemi covid, untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati dipengaruhi banyaknya hal berkembang dalam dirinya disisi psikologis sendiri sebagai hasil sosialisasi dari kandidat yang ia dapatkan.

Orientasi kedekatan ideologi kepada figur pasangan bupati dan wakil bupati dapat mempengaruhi pilihan dan menjadi salah satu faktor pengaruh pada pemilih pemula, suatu contoh pemilih pemula berasal dari keluarga yang fanatik dengan organisasi nahdlatul ulama (NU) akan memilki kecenderungan saat memberikan pilihan pada pasangan bupati dan wakil bupati yang didukung oleh partai politik yang memiliki corak NU seperti PKB dan PPP.

Sementara itu pemilih pemula yang berasal dari kalangan keluarga

berideologi atau berorganisasi nasionalis ada kecenderungan guna memberikan pilihan pada pasangan bupati dan wakil bupati yang di dukung oleh partai-partai nasionalis, seperti PDI-P, Golkar dan yang lain. Selain itu maka faktor figur pasangan Bupati dan Wakil Bupati dan track recordnya akan senantiasa dianalisa oleh pemilih pemula, sejauh mana kepedulian masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya adalah program kerja yang ditawarkan oleh pasangan bupati dan wakil bupati pada kegiatan kampanye pemilihan. Seberapa menarik program kerja yang ditawarkan pasangan tersebut dapat menarik simpati pemilih pemula, sehingga menjatuhkan pilihan kepadanya.

5. Faktor *Money* Politik

Money politik atau lebih kita kenal dengan politik uang yang ada dimasyarakat saat pemilihan baik pemilihan legialatif atau pemilihan kepala daerah sangat sulit untuk di hilangkan dan justru sudah menjadi salah satu kebiasaan bahkan menjadi sebuah tradisi baru di masyarakat yang laksanakan oleh para kontestan pemilu dan pemilihan, untuk memperoleh dukungan serta simpati dari pemilih pemula. Fenomena money politik sebagai hubungan timbale balik antara pemilih pemula dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pemilihan.

Pemilih pemula sebagai salah satu penunjang kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari praktik politik uang, sehingga pemilih pemula mampu mempertimbangkanya dalam menentukan sebuah pilihan politik saat pemilihan. Praktik money politik atau politik uang ada pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serentak tahun 2020 di kabupaten Tuban, yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi di masyarakat, Mayoritas masyarakat yang ada di kabupaten Tuban yang berada pada garis kemiskinan membuka peluang terjadinya praktik money politik atau politik uang.

¹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di kabupaten Tuban pada tahun 2020, penduduk miskin di kabupaten Tuban mencapai jumlah 187.130 jiwa (15,91 %), berkembang menjadi 16.330 orang dibandingkan pada kondisi tahun 2019 yang menyampai 170.800 orang (14,58 %), Porsentase miskin penduduk di kabupaten Tuban (15,91 %) saat tahun 2020, peringkat 5 (lima) paling tinggi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Di daerah karesidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Lamongan, Tuban), porsentase miskin penduduk di kabupaten Tuban merupakan yang paling besar. Sedangkan yang paling kecil yaitu kabupaten Bojonegoro (12,87 %) kabupaten Tuban dalam kondisi garis kemiskinan pada tahun 2020 sebesar Rp. 371.465,00/ kapita setiap bulan, meningkat jika perbandinganya pada tahun 2019 yang besarnya Rp. 348.503,00/ kapita setiap bulan.

Kemiskinan keluarga membuat pemilih pemula tidak dapat lagi berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah uang dari tim kampanye atau pasangan calon. Disamping itu faktor rendahnya pendidikan dari keluarga pemilih pemula yang ada di Kabupaten Tuban juga mempengaruhi praktik money politik atau politik uang. Karna rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya pengetahuan terhadap efek atau hukuman bagi pelaku praktik maney politik atau politik uang. Rendahnya pengetahuan pemilih dalam praktik money politik itu bisa terjadi. Berdasarkan wawancara dengan M Arifin koordiv. pengawasan

BAWASLU Kabupaten Tuban mengungkapkan:

Bahwa praktik money politik itu terjadi saat pemilihan bupati dan wakil bupati tuban tahun 2020, dan mereka yang mengetahui adanya praktik money politik atau politik uang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada BAWASLU. money politik atau politik uang itu ada, cuman ketika pengawasan di lapangan itu sulit untuk di buktikan. Para pelaku rapi dalam praktiknya, dia punya cara untuk melakukan money politik. (Wawancara dengan koordiv. pengawasan BAWASLU kabupaten Tuban, 3 januari 2022).

Berdasarkan wawancara dengan M. Arifin koordiv. pengawasan BAWASLU Kabupaten Tuban dapat disimpulkan bahwa praktik money politik itu terjadi saat pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2020. Mereka yang mengetahui adanya praktik money politik tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Pernyataan adanya money politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban 2020 era pandemi covid disampaikan oleh seorang pemilih pemula asal kecamatan Tuban, Berikut adalah hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Yuda Dwi Prasetyo dari kecamatan Tuban, ketika diwawancarai menyatakan:

Rata-Rata pemilih yang ada disini mendapatkan imbalan dari tim sukses untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati, termasuk saya juga mendapatkannya, imbalanya dalam bentuk barang atau uang, ya sebagai bentuk imbal balik dukungan dan pilihan kepada pasangan bupati dan wakil bupati. Besarannya berfariasi ada yang 30.000 sampai 50.000 bahkan kemarin ada yang memberikan 100.000, (Hasil wawancara dengan Yuda Dwi Prasetyo 19 th, pemilih pemula dari kelurahan Sukolilo kecamatan Tuban, Pada 25 Januari 2022)

Dari hasil wawancara bersama dengan Yuda Dwi Prasetyo, bisa ditarik kesimpulan bahwa Praktik money politik memang masih ada, kita tidak bisa munafik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, sejak pemilihan memakai sistem yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka disitulah visi-misi kandidat bupati dan wakil bupati yang sifatnya ideologis runtuh, sehingga pendekatan yang

digunakan adalah money politik, hampir tidak ada pasangan yang tidak menggunakan money politik, meskipun tidak semuanya menggunakan dalam bentuk uang, ada juga yang memberikan barang. Praktek jual beli suara tidak bisa dibohongi dengan segala macam kemasam sudah menjadi rahasia umum.

Adanya Praktik-praktik money politik atau politik uang itu sangat menciderai demokrasi, karna merampas hak politik seseorang dengan menukar hak pilih dengan uang atau barang dan menjadi salah satu penyebab perilaku korup kepada para pejabat, makna dari money politik itu sendiri luas, termasuk menjanjikan sesuatu pada pemilih itu juga masuk dalam money politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih pemula, rata-rata mereka pernah mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk barang atau uang sebagai bentuk imbalan pilihan kepada pasangan calon atau kontestan.

BAB VI

DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORITIK

6.1 Karakteristik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tuban Era Pandemi Covid-19

Voting behavior atau perilaku memilih adalah perilaku seseorang dalam menentukan pilihan yang dirasa paling disukai atau paling sesuai. Sedangkan menurut Haryanto (2000), Pemungutan suara adalah: “Kegiatan warga negara yang berhak memilih dan terdaftar sebagai pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakilnya”. Perilaku memilih (voting behavior) menurut Jack C Plano dimaksudkan sebagai studi yang fokus pada bidang yang berhubungan dengan kebiasaan atau preferensi masyarakat dalam pemilihan umum, serta penyebab mengapa pemilihan mereka lakukan (Plano, 1985).

Budiarjo (2001) menerjemahkan perilaku memilih suatu kegiatan individu atau banyak orang untuk ikutserta aktif dalam proses-proses politik, di antaranya adalah memilih pemimpin negara dengan secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Tindakan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, ikut serta dalam rapat umum, menghubungi atau melobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung dan sebagainya.

Ada dua jenis teori perilaku memilih yang dapat di golongkan menjadi dua aliran pemikiran utama. Pertama, pendekatan pemungutan suara dari sekolah

sosiologi yang dipelopori oleh Biro Ilmu Sosial Terapan Universitas Columbia. Kedua, pendekatan pemungutan suara dari sekolah psikologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan (Gaffar, 1992:4-9). Menurut Muluk (2012) kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih untuk memilih melalui surat suara.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti bagaimana karakteristik pemilih pemula saat pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Karakteristik pemilih pemula merupakan ciri yang melekat dan khas pada pemilih pemula di kabupaten Tuban, karakter inilah yang tentunya dapat membedakan mereka dengan kelompok pemilih lainnya. Berikut beberapa karakteristik pemilih pemula saat Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tuban.

1. Pemilih Rasional

Orientasi yang tinggi dari pemilih ini memiliki pandangan terhadap kebijakan pemecahan masalah (kebijakan Problem-Solving) serta rendah terhadap orientasi faktor yang ideologis. Dalam hal ini pemilih lebih mengutamakan kemampuan parpol atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat kontestan di masa lalu serta program kerja melalui partai, dan tawaran program yang ditawarkan calon atau parpol dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Ciri khas yang dimiliki jenis pemilih ini tidak begitu mementingkan hubungan ideologis dengan partai politik atau pasangan calon. Yang paling penting untuk tipe pemilih ini adalah apa yang bisa (dan bisa) dilakukan oleh partai atau calon pemimpin.

2. Pemilih Kritis

Untuk membentuk pemilih jenis ini melalui 2 hal supaya dapat terjadi, yang kesatu, nilai-nilai ideologis dijadikan pemilih jenis ini sebagai dasar untuk menentukan kontestan pemilu atau partai mana yang akan mereka pilih dan kebijakan yang akan atau telah dilakukan kemudian mereka akan mengkritisnya. Kedua, sebaliknya bisa juga terjadi dimana lebih dulu pemilih tertarik dengan tawaran program kerja yang oleh suatu partai/clon pemimpin kemudian mencoba memahami nilai dan di balik pembuatan suatu peraturan. Jenis ini adalah pemilih yang kritis, analisis mereka mereka akan selalu ada hubungan antara kebijakan yang dibuat dengan sistem ideologi partai.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih yang punya karakter ini tujuan ideologis yang sangat tinggi, kebijakan partai politik atau calon pimpinan tidak terlalu mereka lihat sebagai hal yang penting dalam keputusan yang diambil. Kedekatan nilai, sosial budaya, asal usul, menjadi hal yang utama pemilih ini, pemahaman ilmu agama sebagai tolak ukur dalam memilih calon pemimpin atau partai. Kebijakan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan yang terkait, menjadi prioritas kedua. Mobilisasi pemilih jenis ini paling mudah pada masa rapat umum, loyalitas yang sangat tinggi dimiliki pemilih jenis ini. Apa saja yang dikatakan oleh calon pemimpin atau anggota parpol mereka menganggap sebagai kebenaran yang mutlak dan harus di ikuti.

25 4. Pemilih Skeptis

Orientasi ideologis pemilih jenis ini tidak cukup tinggi pada partai politik atau calon pemimpin, suatu kebijakan juga tidak dijadikan pemilih jenis ini sebagai sesuatu yang penting. Jika ikut pemilu, biasanya secara acak mereka melakukannya. Pemilih ini percaya kemenangan didapatkan siapapun 78 dalam pemilu, sama saja hasilnya, perubahan tidak akan ada yang signifikan, malah kondisi daerah atau 29 negara bisa terpecah belah. Beberapa tipe pemilih setelah dilihat, pemahaman para kontestan pemilu harus utuh pada semua tipe pemilih dan berusaha memenangkan suara para pemilih itu, melalui beberapa metode kampanye. Dengan pemahaman jenis-jenis pemilih yang terjadi, kemenangan pemilu kemungkinan besar menjadi lebih mudah. Calon pemimpin harus bisa mendapatkan dukungan pada jenis pemilih yang ada setiap tipe. Umumnya dukungan dari tokoh mereka butuhkan untuk kemenangan atau yang membuat masing-masing tipe pemilih di atas memberikan dukungan pada mereka dalam pemilu atau pilkada.

5. Pemilih Transaksional

Bukan sesuatu hal yang baru adanya perilaku transaksional. sikap memilih pemilih yang sangat dikhawatirkan adalah sikap atau perilaku yang transaksional. Gejala tersebut mulai mengemuka pada Pemilu tahun 2004, suka rela mendukung calon pemimpin tidak lagi menjadi sebuah tradisi. imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa di tawar. Mereka mau menghadiri berkampanye rapat umum jika uang transport didapatkan, mendapatkan seragam, dan material- material lainnya.

Pemilihan kepala daerah dalam banyak kasus, sudah banyak perilaku

demikian ditemui. pembagian uang dari calon pemimpin atau berharap terpilih dengan memberikan material lain. Belakangan ini lebih mengemuka dan sudah lama terjadi demikian, ada orang yang mencalonkan menjadi kepala daerah tidak heran sampai menghabiskan miliar rupiah, sedihnya perilaku transaksional ini bahkan ditunjukkan secara terang-terangan.

Di lain sisi, banyak jebakan pada calon pemimpin pada suasana jual beli seperti itu. Kasus yang sering terjadi tokoh masyarakat mendatangi calon, sampai ormas, guna melakukan transaksi guna mendukung mereka. Ada juga pemberian langsung dari tim sukses ⁴⁷ kepada calon pemilih, barang maupun uang mereka berikan. **Bermacam-macam** Alasan pembungkusnya, ada yang zakat, sedekah, dan bahasa lainnya. Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari jual beli, antara yang dipilih dan yang terpilih. Namun, proses demokrasi yang baik, jual beli tersebut tidak dalam bentuk materi yang dijanjikan kepada individu (swasta) yang bersifat instan tetapi kepada masyarakat umum (publik) yang bersifat jangka panjang.

6.2 Implikasi Teoritik

Berdasarkan beberapa pendapat dan bab-bab sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para ahli pada teori, bahwa penelitian tentang karakteristik pemilih pemula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun ¹ 2020 era pandemi covid-19, maka pemilih pemula dalam mengambil sebuah keputusan untuk menentukan pilihan ⁴⁹ memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati selalu dihadapkan dengan pilihan yang rasional atau tidak rasional, menurut Weber perbedaan nilai rasionalitas (*valuationallity*) tujuan dengan rasionalitas (*goal-rationality*). Nilai rasionalitas dapat dijabarkan sebagai aksi orientasi yang

bersandar pada sebuah nilai bisa itu terkait agama, etika, moralitas, dan hal-hal yang bersifat kesukaan, estetika, atau awal muncul. Sementara itu penerjemahan tujuan merupakan orientasi keputusan dan aksi yang didasarkan pada kesesuaian dengan akhir tujuan.

Metode pencapaian dan akibatnya seseorang/pemilih pemula ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir akan dinilai rasional. Sementara itu Firmanzah membagi karakteristik pemilih pemula kedalam kelompok-kelompok: karakteristik pemilih pemula yang rasional, karakteristik pemilih pemula kritis, karakteristik pemilih tradisional dan karakteristik pemilih pemula yang skeptis. Kemudian firmanzah menyebutkan pengaruh faktor-faktor karakteristik pemilih pemula yaitu : faktor social dan budaya, faktor ekonomi dan pendidikan, faktor media, faktor figur pasangan calon dan faktor money politik atau politik uang. Apabila penelitian ini dikaitkan dengan beberapa teori yang di jelaskan pada bab-¹⁷³ bab di atas, maka karakteristik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 saat pandemi covid-19 di kabupaten Tuban, yaitu: karakteristik ⁹⁴ pemilih pemula yang rasional, karakteristik pemilih pemula yang kritis, karakteristik ¹⁶¹ pemilih pemula yang tradisional dan karakteristik pemilih pemilih pemula yang skeptis.

Mayoritas pemilih pemula yang ada di kabupaten tuban memiliki karakteristik yang tradisional. Namun dalam perjalannya terjadi pergeseran karakteristik, yaitu dari karakteristik tradisional kepada karakteristik non rasional (tradisional-non rasional). pengaruh beberapa faktor yang dapat memunculkan karakteristik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tuban ⁹

serentak tahun 2020 saat pandemi covid-19 di kabupaten Tuban adalah faktor sosial dan budaya, ekonomi dan pendidikan, media, figur pasangan calon dan money politik atau politik uang.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil dan penelitian dari bab-bab di atas kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Karakteristik Pemilih pemula Pada pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 saat pandemi covid-19 di kabupaten Tuban, meliputi: karakteristik pemilih pemula yang rasional, kritis, tradisional, skeptis dan karakteristik pemilih pemula yang transaksional. Dari semua karakteristik yang ada didominasi oleh karakteristik pemilih pemula tradisional. Ini dikarenakan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serentak tahun 2020 era pandemi Covid-19 di kabupaten Tuban mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan latar belakang organisasi Nahdhiyin yang memiliki kecenderungan pilihan politik kepada calon pasangan yang di dukung dan di usung oleh partai politik yang memiliki ideologi dan faham agama yang sangat tinggi, pemilih karakter seperti ini figur dan kepribadian pemimpin menjadi hal yang utama serta mitos, dan nilai histori dari keluarga atau latarbelakang politik partai pengusung dan pendukung.

Pemilih yang memiliki loyalitas tinggi atau disebut pemilih tradisional, maka yang dikatakan oleh tim kampanye atau pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebuah hal yang di anggap benar dan sulit untuk dibantah, namun ada perubahan karakteristik pemilih pemula tradisional kepada non rasional disebabkan praktik-praktik money politik atau politik uang, sehingga pemilih pemula ini dalam

menentukan sebuah pilihan mempertimbangkan pada calon yang memberikan sesuatu padanya, berbentuk baik barang atau uang pada pemilih pemula diatas.

¹²⁰ 2. Faktor-faktor yang dapat mengarahkan pada karakteristik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun ¹ 2020 era pandemi Covid-19 di kabupaten Tuban meliputi:

- a. Faktor budaya dan sosial, kondisi budaya dan sosial menjadi salah satu ²² faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik pemilih pemula di kabupaten Tuban. kondisi sosial dan budaya pemilih pemula seperti lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi karakteristik pemilih pemula dalam pengambilan sebuah keputusan untuk menjatuhkan pilihan pada pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Faktor ekonomi dan pendidikan, pemilih pemula yang tidak berasal dari golongan keluarga mapan dalam hal ekonomi dan tidak dari keluarga yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan sisi irasional dalam mengambil sebuah pilihan. Faktor kedekatan, isu, serta pendapat masyarakat bnyak menjadikan hal yang urgent saat proses pengambilan sebuah keputusan.
- c. Faktor media. Media yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemilih pemula, kemampuan media baik massa maupun sosial sangat cepat dalam mendistribusikan informasi merupakan kekuatan yang bisa membentuk opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih pemula dalam menganalisa informasi.
- d. Faktor media. Media yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemilih

pemula, kemampuan media baik massa maupun sosial sangat cepat dalam mendistribusikan informasi merupakan kekuatan yang bisa membentuk opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih pemula dalam menganalisa informasi;

- e. Faktor money politik, money politik atau lebih kita kenal dengan politik uang yang ada dimasyarakat saat pemilihan baik pemilihan legialatif atau pemilihan kepala daerah sangat sulit untuk di hilangkan dan justru sudah menjadi salah satu kebiasaan bahkan menjadi sebuah tradisi baru di masyarakat yang dilakukan oleh para kontestan pemilu atau pemilihan.

7.2 Saran

Penelitian yang fokus pada karakteristik pemilih pemula saat pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban serentak tahun 2020 saat pandemi covid-19 memerlukan beberapa pengembangan yang serius pada masyarakat, adapun pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pendidikan politik dari partai politik dan semua pihak yang berkepentingan kepada pemilih pemula, sehingga pemilih pemula dapat memahami akan hak dan kewajibannya, terkhusus dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Adanya peningkatan sosialisasi terkait money politik atau politik uang oleh penyelenggara pemilu dan para tokoh masyarakat, sehingga pemilih pemula paham bahwa money politik atau politik uang itu tidak dibenarkan dan memiliki konsekwensi hukum baik pemberi maupun penerima.

3. Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) harus meningkatkan pendidikan pemilih, baik berupa kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati atau bentuk lainnya, sehingga pemilih pemula dapat memahami hakikat dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Perlunya adanya peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi pemilihan kepala daerah kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. 2006. *Perilaku memilih dan Pemilu*. Surabaya: PusDeHAM Prees
- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Pilkada: Panduan bagi Stakeholders*. Suaraya: Pustaka Eureka.
- Aminah, 2019. *Ilmu Politik Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta Timur: Prenadamedia group.
- Amanda Prasetyawati, Agus Satmoko Adi, 2021, “Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Surabaya”, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 9 (2), 309-323.
- Abd. Chaidir Marasabessy , Ichwani Siti Utami, Nurdiyana, Setiawati,, 2021 ,” Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19”., *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21 (1) , 8-18.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2020 “ *Statistik Daerah Kabupaten Tuban 2020*”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.
- Budiatri, Imawan, Aisyah. 2020. *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaain dan penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina , 2008, *Demokrasi & Politik Desentralisasi, Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Dja`man Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- John W. Creswell, Vicki L. Plano clark. *Mixed methods research*, Third Edition
- Joko, J. P. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kaunar, A., & Wance, M. 2017. *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah*

Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat). *Journal Ilmu Pemerintahan, Unsyiah* , 56-71.

Kemenke.go.id. 2019. Covid 19. Diakses pada 1 Januari 2021, dari <https://www.kemkes.go.id/>

Kab-tuban.kpu.go.id. 2022. KPU Kabupaten tuban tetapkan DPT Tahun 2020, diakses pada Senin 10 Januari 2022 dari <https://www.kab-tuban.kpu.go.id/page/read/48/info-pemilihan-2020>

Kab-tuban.kpu.go.id. 2022. *KPU Kabupaten tuban Rekapitulasi hasil perhitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati tuban tahun 2020*, diakses pada Senin 10 Januari 2022 dari <https://www.kab-tuban.kpu.go.id/page/read/48/info-pemilihan-2020>

Kab-tuban.kpu.go.id. 2022. *Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor 467 Tahun 2020*, diakses pada Senin 10 Januari 2022 dari <https://www.kab-tuban.kpu.go.id/page/read/48/info-pemilihan-2020>

Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Munir Mulkam, Abdul.2003. *Moral Politik Santri* Jakarta:Erlangga.

Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Gramedia Pustaka

Utama Jakartaarno Wance, Bakri La Suhu, 2019, “*Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara*”, *jurnal of government - jog* (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), 4 (2), 91- 115.

Mopeng, Esther. D. 2016. *Jurnal: Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara*. Ilmu pemerintahan FISIP Unsrat.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Menenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPD, DPRD*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Njoko, V. 2018. *Strategi Komunikasi Politik Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam Mensosialisasikan Program Pendidikan Karakter*. *E-Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya*, 6 (1): 1-11.

Nur Wardhani, P. S. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. *Jupius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57

- Pameliana Putri, Maya Mustika Kartika Sari, 2020., "Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Sidoarjo". 5 (2), 51 – 65.
- ³ Purba, C.C. 2017. "Hubungan Faktor Sosiologis Dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan Tahun 2015 Di Kecamatan Bandar Petalangan (Studi Kasus Desa Lubuk Keranji Timur dan Desa Kuala Semundam)". *JOM FISIP*, 4 (2), 1-15.
- ⁵⁷ PP No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak.
- ¹⁸ Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 Th 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- ⁷³ Rustan IR, Munawir Ariffin, 2019, " Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*. 4 (2), 153 – 164.
- ¹⁵ Rohendi, Faisal Muzzammil, 2021, "Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta" *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4 (1), 46-65.
- Rosda Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pesta Demokrasi Pedesaan*. Jogjakarta: P3PK (PusatPenelitian Pembangunan dan Kawasan), Aditia Media.
- ³ R.R, Emila, Y & Ichwanuddin, W. 2015. "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014". *Jurnal Penelitian Politik*, 1 (1), 117-135.
- ¹² Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- ¹¹ Syamsudin Haris, 2014, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- ³ Safitri, R. A. 2016. "Perilaku Memilih Masyarakat Muslim pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Politik Muda*, 5 (2). 247-255.

¹ Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁵ Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwa. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia

⁶⁸ W. Lawrence Neuman. *Sosial Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches*, Sevent Edition

TESIS NU_ROKHIB 20550010 turnitin

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	erepository.uwks.ac.id Internet Source	5%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	journal.unj.ac.id Internet Source	1%
8	jdih.kpu.go.id Internet Source	1%
9	www.mkri.id Internet Source	1%

10	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
13	id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
15	journal.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
17	es.scribd.com Internet Source	<1 %
18	jatim.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
20	infocovid19.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
21	repository.upy.ac.id Internet Source	<1 %

22	id.scribd.com Internet Source	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.hynasution.com Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
28	kpkainsuka.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
32	tubankab.go.id Internet Source	<1 %

33	bholybahhy05.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
35	privatkomputerbandung.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
37	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
38	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %
40	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
42	kaltim.prokal.co Internet Source	<1 %
43	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
44	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %

45	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
46	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
47	antikorupsi.org Internet Source	<1 %
48	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
49	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
50	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
52	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
53	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to Bentley College Student Paper	<1 %
55	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
56	unimuda.e-journal.id Internet Source	<1 %

<1 %

57

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

58

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

59

kpud-tasikmalayakab.go.id

Internet Source

<1 %

60

dumadia.wordpress.com

Internet Source

<1 %

61

Submitted to University of Oklahoma

Student Paper

<1 %

62

kpu.go.id

Internet Source

<1 %

63

puskesmasbanjarejo.madiunkota.go.id

Internet Source

<1 %

64

tracking.mkri.id

Internet Source

<1 %

65

eprints.uns.ac.id:443

Internet Source

<1 %

66

perspektif.ppj.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

67

ppsp.nawasis.info

Internet Source

<1 %

68	ejournal.politik.lipi.go.id Internet Source	<1 %
69	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.komnasham.go.id Internet Source	<1 %
72	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
73	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	<1 %
74	mkri.id Internet Source	<1 %
75	www.govserv.org Internet Source	<1 %
76	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
77	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
78	adoc.pub Internet Source	<1 %
79	prosiding.unirow.ac.id	

Internet Source

<1 %

80

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

<1 %

81

www.docstoc.com

Internet Source

<1 %

82

Submitted to IAIN Kudus

Student Paper

<1 %

83

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

<1 %

84

covid19.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

85

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

86

dkpp.go.id

Internet Source

<1 %

87

repo.apmd.ac.id

Internet Source

<1 %

88

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

89

repository.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

90

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

91	www.kpud-gianyarkab.go.id Internet Source	<1 %
92	www.mangkunegara.com Internet Source	<1 %
93	www.medcom.id Internet Source	<1 %
94	123dok.com Internet Source	<1 %
95	inspektorat.lipi.go.id Internet Source	<1 %
96	www.sciencegate.app Internet Source	<1 %
97	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
98	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
99	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
100	rewangrencang.com Internet Source	<1 %
101	www.riauonline.co.id Internet Source	<1 %
102	Submitted to Udayana University	

<1 %

103 Submitted to Universitas Bina Darma
Student Paper

<1 %

104 Submitted to Universitas Siliwangi
Student Paper

<1 %

105 garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source

<1 %

106 journal.stiem.ac.id
Internet Source

<1 %

107 zh.scribd.com
Internet Source

<1 %

108 Nur Iqrima, Amrazi Zakso, Supriadi Supriadi.
"TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEMILIH
PEMULA PADA PILKADA GUBERNUR 2018
DITINJAU DARI JENIS KELAMIN DAN
PENDIDIKAN", Proceedings International
Conference on Teaching and Education
(ICoTE), 2019
Publication

<1 %

109 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper

<1 %

110 Submitted to Universitas Pendidikan
Indonesia
Student Paper

<1 %

111	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
112	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
113	jamberita.com Internet Source	<1 %
114	moam.info Internet Source	<1 %
115	sosialc.blogspot.com Internet Source	<1 %
116	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
117	www.radarcirebon.com Internet Source	<1 %
118	issuu.com Internet Source	<1 %
119	jamstatusquo.blogspot.com Internet Source	<1 %
120	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
121	kpu-lampungutara.go.id Internet Source	<1 %
122	malutpost.co.id Internet Source	<1 %

123	musniumar.wordpress.com Internet Source	<1 %
124	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
125	styelist.blogspot.com Internet Source	<1 %
126	wartakalteng.blogspot.com Internet Source	<1 %
127	www.cucuk-spog.com Internet Source	<1 %
128	www.kpud-nganjukkab.go.id Internet Source	<1 %
129	4html.net Internet Source	<1 %
130	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
131	kuninganmass.com Internet Source	<1 %
132	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
133	northsumatrainvest.id Internet Source	<1 %
134	www.dprd.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %

135	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
136	www.marsomedia.com Internet Source	<1 %
137	Submitted to Universitas Islam Internasional Indonesi Student Paper	<1 %
138	bloktuban.com Internet Source	<1 %
139	docslide.us Internet Source	<1 %
140	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
141	idoc.pub Internet Source	<1 %
142	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
143	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	<1 %
144	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
145	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
146	library.jakarta.bawaslu.go.id	

Internet Source

<1 %

147 nursyam.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

148 rakyatsultra.com
Internet Source

<1 %

149 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

<1 %

150 repository.unimal.ac.id
Internet Source

<1 %

151 repository.unmuhjember.ac.id
Internet Source

<1 %

152 tandatanya40.wordpress.com
Internet Source

<1 %

153 www.jendelasumsel.com
Internet Source

<1 %

154 www.neliti.com
Internet Source

<1 %

155 www.pabriktips.com
Internet Source

<1 %

156 www.slideshare.net
Internet Source

<1 %

157 Ade Tri Widyanti, Muhammad Raji Fudin.
"Pemenangan Elektoral berbasis Karakter

<1 %

Lokal: Strategi Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara", Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022

Publication

158 M Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali. "Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017", ijd-demos, 2020 <1 %

Publication

159 Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia", SASI, 2021 <1 %

Publication

160 digilib.uinkhas.ac.id <1 %

Internet Source

161 dokument.pub <1 %

Internet Source

162 eprints.umpo.ac.id <1 %

Internet Source

163 etheses.uin-malang.ac.id <1 %

Internet Source

164 incagri.com <1 %

Internet Source

165 jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

<1 %

166 nakhoda.ejournal.unri.ac.id
Internet Source

<1 %

167 partnership.or.id
Internet Source

<1 %

168 portalkaltara.com
Internet Source

<1 %

169 repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

<1 %

170 repository.ummetro.ac.id
Internet Source

<1 %

171 repository.unja.ac.id
Internet Source

<1 %

172 saranankri.com
Internet Source

<1 %

173 sista.polindra.ac.id
Internet Source

<1 %

174 umae29.blogspot.com
Internet Source

<1 %

175 www.detik.com
Internet Source

<1 %

176 www.dkpp.go.id
Internet Source

<1 %

177	www.sugiyatno.com Internet Source	<1 %
178	yusrintosepuabdikarya.wordpress.com Internet Source	<1 %
179	Ali Ismail Shaleh, Raihana Raihana. "Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2021 Publication	<1 %
180	Fajar Shodiq Ramadhan, Romel Masykuri. "Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018", Jurnal Penelitian Politik, 2018 Publication	<1 %
181	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
182	Hendra Alfani. "PERAN FACEBOOK DALAM KAMPANYE POLITIK PEMILUKADA DI KABUPATEN OGAN KEMIRING ULU", LUGAS Jurnal Komunikasi, 2018 Publication	<1 %
183	Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

184 Muhammad Akbar, Muhajir Muhajir, Hamiyuddin Hamiyuddin. "OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021
Publication <1 %

185 konsultasiskripsi.com
Internet Source <1 %

186 nalrev.fhuk.unand.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

TESIS NU_ROKHIB 20550010 turnitin

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163
